

**PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA UNIVERSITAS WARMADDEWA
TERHADAP DUALISME PEMERINTAHAN DESA
PEKRAMAN DAN DESA DINAS DI BALI
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014**



**OLEH
I GEDE EKA ANGGARA PURNAWAN
NIM :1121121005**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WARMADDEWA
DENPASAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui dan siap diuji dihadapan tim penguji

Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Warmadewa

Denpasar

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Drs I Wayan Gede Suacana, M.Si)

(Drs. I Ketut Jika, M.Si)

PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dan disahkan dihadapan
Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa
Denpasar

Pada hari : Selasa
Tanggal : 24 Maret 2015
Waktu : 09.00 wita
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa

TIM PENGUJI

1. Dr.Drs I Wayan Gede Suacana, M.Si: (.....)
(Ketua)
2. Drs. I Ketut Jika, M.Si : (.....)
(Sekretaris)
3. Dra. Diah Rukmawati, M.Si : (.....)
(Anggota)
4. Drs. I Gede Janamijaya, M.Si : (.....)
(Anggota)
5. Dra. Ni Made Anggriyani, M.Si : (.....)
(Anggota)

MOTTO

“NIYATAM KURU KARMA TVAM”

“Bekerjalah Sesuai Dengan Apa Yang Telah Ditentukan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta.

Adik-adik tersayang

Saudara-saudara ku dan keluarga besar terkasih serta rekan-rekan kerja di SMA

Negeri 1 Kuta Utara yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini

dan telah memberikan dorongan serta dukungan dalam menyelesaikan studi ini

Almamaterku Unwar yang sangat kubanggakan

Serta semua keluarga dan sahabat-sahabat baikku

Terima kasih atas segalanya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I GEDE EKA ANGGARA PURNAWAN

NIM : 1121121005

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa

Alamat : Jalan Raya Padang Luwih No. 111, Banjar Celuk - Desa Dalung

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERSEPSI DAN SIKAP MAHASISWA UNIVERSITAS WARMADEWATERHADAP DUALISMEPEMERINTAHAN DESA PEKRAMAN DAN DESA DINAS DI BALI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNO 6 TAHUN 2014” adalah hasil karya sendiri dan belum pernah ada penelitian yang sama sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

I Gede Eka Anggara Purnawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya dapat diselesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Dan Sikap Mahasiswa Universitas Warmadewa Terhadap Dualisme Pemerintahan Desa Pekraman Dan Desa Dinas Di Bali Setelah Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014” tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat sumbangan pikiran dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Atas segala bimbingannya, dengan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, M.S., selaku Rektor Universitas Warmadewa.
2. Bapak Drs. I Wayan Sudemen, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa.
3. Ibu Dra. Diah Rukmawati, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa.
4. Bapak Dr. I Wayan Gede Suacana, M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, saran dan masukan guna kesempurnaan skripsi ini serta memberi arahan selama studi di fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa.

5. Bapak Drs. I Ketut Jika, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan pengetahuan teoritis yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan doa sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca. Akhir kata, semoga jasa dan budi baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dengan amal perbuatannya dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Denpasar, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Tinjauan Teoritis	9
F. Definisi Konsepsional	26
G. Definisi Operasional	28
H. Metode Penelitian	31
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Sejarah Singkat Universitas Warmadewa	42
B. Lambang, Visi, dan Misi Universitas Warmadewa	42
C. Periodesiasi Pimpinan Universitas Warmadewa	45

D. Yayasan dan Universitas.....	48
E. Universitas	49
F. Tugas dan Fungsi	52
G. Kampus dan Fasilitas Universitas	56
H. Kemahasiswaan.....	58
BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	66
A. Deskripsi Sampel	66
B. Analisis Variabel.....	69
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dimana dalam sistem pemerintahan desanya terdapat dualisme yang terdiri dari desa dinas dan desa pakraman. Dimana desa pakraman merupakan suatu struktur pemerintahan desa asli Bali yang berlandaskan desa, kala, patra. Sedangkan desa dinas yang memiliki struktur sama dengan desa pakraman namun terdapat perbedaan dalam struktur dan pelaksanaan tugasnya. Ketika diterbitkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terjadi polemik berkepanjangan khususnya di Bali. Yang dimana di dalam Undang-undang ini menginginkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif serta bertanggungjawab dengan ketentuan adanya pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Disini menimbulkan rasa kekhawatiran oleh masyarakat Bali. Dengan adanya permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mendalami masalah tersebut yang dimana mahasiswa dijadikan bahan penelitian karena mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi dan sikap mahasiswa universitas Warmadewa Denpasar terhadap adanya dualisme pemerintahan desa dinas dan desa pakraman di Bali setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa dinas dan desa pakraman di Bali setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 baik dari segi aspek pandangan, tanggapan, kognitif, afektif, dan evaluasi.

Untuk memecahkan masalah dibutuhkan landasan teori sebagai penuntun pemecahan masalah yang dimana dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang dipadukan dengan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode observasi dan kuisioner.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh simpulan bahwa persepsi dan sikap mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang undang nomor 6 tahun 2014 termasuk dalam kategori sedang. Dimana dalam persepsi, mahasiswa menunjukkan persepsi negatif atau kurang paham, ini terlihat dari kecenderungan mahasiswa atau 37 reponden (39,15%) menjawab sedang. Dalam aspek sikap, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kurang mendukung. Ini terlihat dari rata-rata skor masing-masing aspek (kognitif, afektif, dan evaluasi) yang termasuk dalam kategori sedang, karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan sebuah pulau yang sangat tersohor di manca negara. Karena Bali mempunyai daya tarik kebudayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Kebudayaan Bali dan kesenian Bali menjadi tulang punggung dalam menopang perekonomian masyarakat Bali pada khususnya serta Indonesia pada umumnya. Kearifan Lokal yang terdapat di Bali sangat memiliki peran penting dan menjadi pedoman bagi masyarakat Bali untuk menjaga Bali itu sendiri. Selain itu budaya masyarakat yang menitik beratkan pada konsep menyama braya yakni suatu hubungan tolong menolong sesama masyarakat satu dengan lainnya, hal tersebut yang mengimbangi dampak dari era globalisasi. Selain itu terdapat konsep yang menitik beratkan pada hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), serta hubungan manusia dengan alamnya (palemahan) dan hubungan manusia dengan manusia (pawongan). Itulah yang dimaksud dengan konsep Tri Hita Karana, dimana konsep tersebut telah terapkan dengan baik pada segala sistem yang terdapat pada masyarakat di Bali. Konsep tersebutlah yang telah mempertahankan keseimbangan destinasi kebudayaan, pemerintahan, dampak globalisasi, dan antar umat beragama di Bali. Dalam penerapannya konsep tersebut dapat di aplikasikan melalui desa pekraman dan didampingi oleh desa dinas.

Desa pekraman merupakan suatu struktur pemerintahan desa asli Bali. Dimana susunan ke pemerintahannya yang sangat tradisional dan mengedepankan adat istiadat sesuai dengan desa, kala, patra (tempat, waktu dan keadaan) yang berlaku disuatu desa. Untuk mengatur masyarakatnya, desa pekraman memiliki konsep peraturan yang didasari oleh Tri Hita Karana. Dimana konsep – konsep tersebut diaplikasikan dalam bentuk awig – awig (hukum adat tertulis) dan kebiasaan adat istiadat setempat (hukum tidak tertulis). Desa pekraman tersebut sudah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Begitu juga sebaliknya dengan desa dinas, yang memiliki struktur sama seperti desa pekraman. Namun yang membedakan struktur tersebut adalah pelaksanaan tugasnya. Desa dinas berwenang untuk mengatur masyarakatnya melalui peraturan desa dinas tersebut dan desa dinas bertanggung jawab penuh atas masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem administrasi yang diterapkan oleh desa dinas diatur pula oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, bukan keadaan dualisme yang muncul tetapi proses harmoni sampai dengan sebelum tahun 1979. Tumpang tindih antara peran yang dilakukan desa adat dan desa dinas terutama terjadi pada masa berlakunya undang-undang no 5 tahun 1979. Keadaan seperti itulah yang menimbulkan wacana, rasa khawatir antara tokoh – tokoh masyarakat adat, kalau peran dan fungsi yang “otonom” dari desa adat akan menjadi terdesak, di dominasi oleh desa dinas. Pada era reformasi keadaan tumpang tindih itu ingin diperbaiki sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan antara keduanya. Berangkat dari sanalah kalangan elit-elit politik di DPR terutama yang mewakili Bali, berniat untuk

menyeragamkan atau menyatukan antara kedua desa tersebut menjadi satu kesatuan. Dalam sejarah pengaturan desa telah diberlakukan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu : UU No. 2 tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, UU No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, UU No. 19 tahun 1965 tentang desa praja, UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan terakhir dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Perda Prov.Bali No 3 Th 2001 tentang Desa Pekraman. Meskipun pengaturan desa dengan undang-undang telah mengalami 8 kali perubahan sebagaimana diuraikan diatas, namun belum juga dapat mengoptimalkan peranan diantara kedua desa tersebut, diantaranya saling berbeda pendapat pada saat pengambilan suatu kebijakan yang selalu menitik beratkan pada suatu keberadaan desa tersebut serta pembagian wewenang diantara kedua Desa. Seperti yang terjadi di suatu Desa yang memiliki dualisme pemerintahan. Dalam penerapannya kebijakan yang di buat sering terjadi tumpang tindih antara Desa tersebut. Dimana, salah satu pihak merasa tidak dapat menjalankan keputusan yang telah dibuat bersama. Baik itu kebijakan Adat maupun Dinas, yang pada penerapannya seharusnya dapat dilakukan oleh kedua pihak tanpa ada pengecualian serta ada yang merasa terdiskriminasi. Oleh karena itu disinilah dituntut pengaplikasian UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang baru saja disahkan pada awal tahun 2014, dimana didalamnya mencantumkan bahwa undang – undang ini menginginkan pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Dimana pokok bahasan undang – undang

nomor 6 tahun 2014 ini tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Disinilah muncul rasa khawatir oleh masyarakat Bali pada khususnya karena undang – undang tersebut ingin menghilangkan salah satu nama dari desa tersebut dan menggabungkan tugas serta wewenang menjadi satu dalam status desa yang baru. Disinilah di tuntut peran serta generasi muda khususnya mahasiswa, dimana mahasiswa merupakan kelompok muda golongan kritis, universal, menggunakan rasionalitasnya dalam melihat permasalahan atau fakta yang ada di depannya. Dari akalinya, atau proses berpikirnya dengan menggunakan informasi awal yang diterima semenjak di bangku Sekolah dan pengalaman hidup membuat kehidupan mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi. Daya kritis ini muncul karena konsekuensi dari perilaku seorang mahasiswa. Telah sampai akalinya untuk memberikan makna dan mengasosiasikan segala masalah atau fakta yang ada dengan pengetahuan atau informasi yang dimiliki. Dari keunikan sifat yang dimiliki mahasiswa, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi dan sikap mahasiswa dalam menganalisis permasalahan dualisme pemerintahan desa di Bali setelah berlakunya undang – undang yang terbaru yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti mengangkat judul yang berjudul “Persepsi dan sikap Mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap Dualisme Pemerintahan Desa Pekraman dan Dinas setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

B. Rumusan Masalah

Setiap tujuan kegiatan atau usaha pastinya menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Sebelum masuk kedalam rumusan masalah maka sangat di pandang perlu oleh penulis untuk mendefinisikan tentang masalah dari beberapa pakar publik/pemerintahan antara lain,:

Menurut Winarno Surachmand (1999:33) masalah adalah kesulitan yang menggerakan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat di rasakan sebagai rintangan yang harus di lalui apabila kita berjalan terus. Menurut H winardi, (1976 : 20) masalah adalah pemecahan konflik-konflik/kesulitan dari kebutuhan yang di jumpai oleh pemikiran yang bekerja dalam situasi tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya masalah adalah suatu hambatan kesulitan atau rintangan yang menjadi fokus dalam hal untuk mencapai suatu tujuan kegiatan, sehingga hal ini akan menuntut suatu pemecahan masalah dengan berbagai alternatif pemecahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.1 Bagaimanakah persepsi Mahasiswa Universitas Warmadewa tentang dualisme pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas setelah berlakunya undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa?

- 1.2 Bagaimana sikap Mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas setelah berlakunya undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengertian. Menurut Sutrisno Hadi, (1996 : 3) tujuan umum penelitian ialah; menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada masih diragu-ragukan kebenarannya.”

Secara umum, adapun tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap mahasiswa Universitas Warmadewa tentang dualisme pemerintahan Desa khususnya di Bali, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Dapat membuka wawasan didalam mempelajari tentang seluk beluk desa dan mengetahui asal-usul desa tersebut serta memperdalam pengetahuan tentang sistem yang diterapkan disuatu desa.

b. Bagi Univertas/Fakultas

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pemerintahan dan sebagai inventarisasi perpustakaan sebagai bahan bacaan masyarakat kampus baik mahasiswa maupun dosen.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengambil suatu kebijakan baik di desa pekraman maupun desa dinas agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa buku yang membahas persoalan tentang desa pekraman dan desa dinas yang telah di publikasikan sebelumnya antara lain:

Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali. Buku ini ditulis oleh seorang guru besar bidang sejarah yaitu Prof.Dr.I Gde Parimartha dan terbitkan oleh Udayana Pers pada tahun 2013.. Dalam buku ini diungkapkan adanya desa dinas dan desa adat yang belakangan disebut Desa Pekraman. Kedua lembaga yang mengurus ikhwal pnduduk Bali ini “saling seluk” (saling mengambil peran), sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak pernah selesai. Ada pihak yang memandang desa dinas perlu di hapuskan, dan yang lain memandang desa dinas perlu dipertahankan karena menjalankan tugas dan fungsi berbeda dengan desa adat. Buku ini mencoba membedah dikotomi ini dalam persepektif historis, dengan demikian pembaca memiliki bahan – bahan yang lengkap untuk melihat secara komprehensif masalah ini.

Perbedaan buku ini dengan karya tulis yang sedang dibuat adalah dimana karya tulis ini mencoba mengangkat masalah tentang adanya dualisme desa di Bali dengan berlakunya Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 dari aspek persepsi mahasiswa. Sedangkan buku tersebut hanya membahas perbedaan pandangan para ahli tentang desa adat dan desa dinas.

Desa Adat Menggugat dan Digugat Buku ini di tulis oleh Prof.Dr. Tjok Istri Putra Astiti,SH,MS dan diterbitkan oleh Udayana university Pers pada tahun 2013.Buku ini disusun dengan mengintegrasikan beberapa artikel atau makalah yang dibuat sebelumnya dan telah disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah. Pertama, dari sisi desa adat termarjinalkan oleh kekuatan – kekuatan dari atas (Negara). Terutama dalam kaitannya dalam hak – hak atas tanah dan sumber daya alam, sehingga pada saat desa adat bereaksi melakukan perlawanan, yang peneliti istilahkan sebagai menggugat. Kedua, dari sisi kecenderungan desa adat juga bersifat arogan karena telah memarjinalkan warganya ataupun kelompok warga terutama dalam kaitan dengan penetapan sanksi adat, yang akhirnya juga mendapat perlawanan dari pihak yang termarjinalkan. Dalam hal ini peneliti sebut dengan istilah digugat. Dengan melihat desa adat dan hukum adat dari dua sisi itu, memungkinkan untuk mengkaji kondisi desa adat saat ini secara objektif.

Perbedaan karya tulis ini dengan buku tersebut dimana buku tersebut hanya membahas tentang keberadaan desa adat yang saling berseteru dengan keberadaan kekuatan – kekuatan diatasnya (Negara) dan lebih menekankan kepada keberadaan desa adat dan hukum adat itu sendiri. Sedangkan karya tulis ini mengangkat masalah

tentang adanya dualisme desa di Bali dengan berlakunya Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 dari aspek persepsi mahasiswa.

E. Tinjauan Teoritis

Seperti mana biasa di setiap penulisan karya ilmiah perlu adanya suatu tinjauan teoritis yang sudah barang tentu mempunyai kaitan dengan apa yang penulis bahas dala penulisan sebuah skripsi. Sehingga nantinya dapat membantu penulis dalam mengolah data maupun merangkai data.

Sebelum penulis menguraikan tentang tinjauan teoritis maka terlebih dahulu akan menguraikan tentang apa itu yang di maksud dengan teori.

Menurut Miriam Budiarjo (1996:30) “Teori adalah generalisasi yang abtrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep, konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abtrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan.”

Menurut James A. Balck dan Dean J.Champion (1992:49) “Teori adalah kumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menetapkan kaitan sebab akibat diantara variabel-variabel”.

Dengan demikian dpat di simpulkan bahwa teori merupakan landasan pemikiran yang memuat rangkaian logis dan sistematis dari suatu variabel, fenomena, dalam memahami atas pemecahan masalah-masalah yang di hadapi dalam suatu penelitian.

Rangkaian konsep yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Jalaludin Rahmat (1986:64) Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut Suyakto (1988:2) Persepsi adalah proses mebuatan penelitian atau membangun kesan mengenai berbagai macam yang terdapat dalam lapangan pengindraan seseorang.

Dalam kamus psikologi, persepsi adalah di mana seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya, pengetahuannya melalui indra-indra yang dimilikinya, pengetahuan yang diperoleh interpersi panca indra. (Maligo 1983:207)

Sedangkan dalam psikologi sosial persepsi adalah suatu proses yang di dahului pengindraan. Pengindraan adalah suatu proses diterimanya stimulasi oleh individu melalui alat penerimaan yaitu alat indra. Namun proses tersebut tidak selesai sampai di sana. Pada umumnya stimulasi itu di teruskan oleh beberapa syarat, dan proses selanjutnya adalah persepsi. Di sini persepsi tidak lepas dari proses pengindraan karena proses pengindraan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi agar individu dapat menyadari untuk mengadakan persepsi maka ada beberapa syarat yang harus di penuhi antara lain:

- A. Adanya obyek yang dipersepsi, obyek yang menimbulkan stimulasi yang mengenai alat indra atau reseptor stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai syarat penerimaan yang bekerja reseptor.

B. Alat indra yaitu merupakan alat penerimaan stimulasi di samping harus ada pula syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang di terima reseptor kepusat susunan syarat yaitu otak sebagai kesadar.

C. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu di perlukanpula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan persiapan dalam mengadakan persepsi (Ibis:64)

Batasan di atas dapat menunjukan bahwa persepsi adalah berkaitan dengan peristiwa yaang di tangkap panca indra melalui pengelihatn indra mata,indra telinga atau pendengaran dan perabaan. Dari semua tanggapan panca indra di proses dalam diri kita kemudian akan timbul adanya pengertian dan pengetahuan diolah ,di seleksi berahir dengan penafsiran atau persepsi tentang obyek itu.

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana tersebut di atas mengenai pengertian persepsi serta uraiannya, peneliti berkesimpulan bahwa persepsi merupakan “Pandangan, tanggapan dari seseorang melalui proses pengindraan terhadap segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungannya”. Dengan melihat uraian mengenai persepsi di atas dapat di katakan bahwa persepsi dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap objek yang di persepsi.

2. Sikap

Konsep tentang sikap telah berkembang dan melahirkan berbagai macam pengertian diantara ahli psikologi (Widiyanta, 2002). Sikap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak.

Sedangkan menurut Oxford Advanced Learner Dictionary (dalam Ramdhani, 2008), sikap merupakan cara menempatkan atau membawa diri, merasakan, jalan pikiran, dan perilaku.

Masri, dalam Widiyanta (2002), mendefinisikan sikap sebagai suatu kesediaan dalam menanggapi atau bertindak terhadap sesuatu. Allport, dalam Widayanta (2002), mengartikan sikap sebagai suatu keadaan siap yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap objek tertentu yang mengarah pada arah yang mendukung (favorable) dan tidak mendukung (unfavorable).

Azwar, dalam Ananda (2009), menggolongkan definisi sikap ke dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, sikap merupakan suatu bentuk reaksi atau evaluasi perasaan. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu adalah memihak maupun tidak memihak. Kedua, sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap objek tertentu, Ketiga, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang salingberinteraksi satu sama lain.

Menurut Allport, sikap merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang didalamnya terdapat pengalaman individu yang akan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. (Sarwono, 2009).

Zanna dan Rempel (dalam Voughn & Hoog, 2002) menjelaskan sikap merupakan reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang (Sarwono, 2009).

Thurstone (dalam Edwards, 1957), menyatakan bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berhubungan dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif merupakan afeksi yang menyenangkan dan sebaliknya afeksi yang negatif merupakan afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian objek dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dan berbagai macam tingkatan afeksi pada seseorang (Walgito, 2003).

Dalam Widiyanta (2002), Assael (1984) dan Hawkins (1986), menjelaskan sikap memiliki beberapa karakteristik, antara lain: arah, intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitas. Karakteristik arah menunjukkan bahwa sikap mengarah pada setuju atau tidak setuju, mendukung atau menolak terhadap objek tertentu. Karakteristik intensitas mengarah pada perbedaan derajat kekuatan sikap setiap individu. Karakteristik keluasan sikap menunjuk pada cakupan luas tidaknya aspek dari objek sikap. Karakteristik spontanitas menunjukkan sejauh mana kesiapan individu dalam merespon atau menyatakan sikapnya secara spontan.

Secord and Bacman (Zaim Elmubarak, 2009: 46) membagi sikap menjadi tiga komponen yang dijelaskan sebagai berikut: Komponen kognitif, adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Komponen afektif, adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem

nilai yang dianut pemilik sikap. Komponen konatif, adalah komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu bentuk evaluasi perasaan untuk bereaksi secara bipolar yakni positif maupun negatif terhadap objek tertentu yang dibentuk dari interaksi antara komponen kognitif, afektif, dan konatif.

3. Mahasiswa

Pengertian Mahasiswa menurut Knopfemacher (Suwono, 1978) adalah merupakan insane-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.

Pengertian mahasiswa menurut ahli. Menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi (Poerwadarminta, 2005: 375). Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa,

yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Mahasiswa adalah manusia yang tercipta untuk selalu berpikir yang saling melengkapi (Dwi Siswoyo, 2007: 121). Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi, mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi

Pengertian Mahasiswa menurut etimologi atau asal-usul katanya, mahasiswa berasal dari dua suku kata yaitu, kata “Maha” dan “Siswa”. Kata “maha” berarti besar, paling, ter, sangat sedangkan siswa berasal dari kata “Murid” dari kata “Iradatan” yaitu orang yang mencari pengetahuan di tingkat sekolah dasar, menengah. Jadi mahasiswa ialah seseorang yang lebih tinggi, baik tingkat tempat dimana dia belajar (SD, SMP, SMP) maupun tingkat intelektualnya.

Mahasiswa merupakan kelompok muda golongan kritis, universal, menggunakan rasionalitasnya dalam melihat permasalahan atau fakta yang di depannya. Dari akalinya, atau proses berpikirnya dengan menggunakan informasi awal yang diterima semenjak di bangku Sekolah dan pengalaman hidup membuat kehidupan mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi. Daya kritis ini muncul karena konsekuensi dari akal baliknya seorang mahasiswa. Telah sampai akalinya untuk memberikan makna dan mengasosiasikan segala masalah atau fakta yang ada dengan pengetahuan atau informasi yang dimiliki.

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah Mahasiswa adalah kelompok muda golongan kritis, universal, menggunakan rasionalitasnya dalam melihat permasalahan atau fakta yang di di depannya. Dari akalunya, atau proses berpikirnya dengan menggunakan informasi awal yang diterima semenjak di bangku Sekolah dan pengalaman hidup membuat kehidupan mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi.

4. Desa dan Dualisme Pemerintahan Desa

Dualisme (*dualism*) berasal dari kata Latin yaitu *duo* (dua). Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi, misalnya substansi adi kodrati dengan kodrati, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan dll (Save M. Dagun 1977:189).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah kabupaten”. (UU no 12 Th1999:12)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU no 32 Th 2004)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU No 6 Th 2014)

“Desa Pekraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dan ikatan khayangan tiga/ khayangan Desa yang mempunyai harta dan kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri”. (Perda Prov.Bali No 3 Th 2001 tentang Desa Pekraman : 4)

Menurut Ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan” artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”. Menurut Prajudi dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Office Management (1973:111) sistem adalah prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang dibuat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Menurut Sumantri dalam bukunya Sistem Pemerintahan Negara (1979:17) sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi,

atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Pengertian Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu Negara.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.

Sistem Pemerintahan Desa, yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang terdapat dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Atau suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Landasan pemikiran dan pengaturan mengenai Desa Pekraman adalah keaneka ragaman , partisipasi, otonomi asli,demokrasi dan pemberdayaan krama desa sedangkan landasan dasar dari Desa Pekraman adalah Tri Hita Karana yang

mengandung karakteristik konstitusif yang menjadi tolak ukur sepiritual etis bagi keseluruhan dasar-dasar yang disucikan dalam prikehidupan masyarakat.

Di Bali sendiri Desa Dinas ada setelah terbentuknya Desa Pekraman. Desa Pekraman di pimpin oleh seorang pemuka Adat atau yang sering di sebut dengan Bendesa, sedangkan Desa Dinas di pimpin atau di ayomi oleh seorang Lurah atau Kepala Desa.

Desa Dinas adalah sebuah kelompok masyarakat yang secara sruktural, teritorial terkait dengan tugas-tugas pemerintah pusat. (Parimatha, 2013:24)

Marginalisasi desa adat di Bali dimulai masuknya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan (1906-1908) menggantikan posisi kerajaan atas desa-desa di Bali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan dua sistem pemerintahan; sistem pemerintahan langsung di bawah Belanda dan sistem pemerintahan sendiri oleh raja-raja yang disebut dengan daerah swapraja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Belanda memanfaatkan Perbekel sebagai wakilnya untuk mengawasi keadaan di desa. Dengan Perbekel yang diangkat sendiri, Belanda membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa dengan membentuk desa baru bentukan pemerintah kolonial. Dengan desa yang baru diharapkan didalamnya akan terdapat 200 orang penduduk desa yang siap menjalankan tugas-tugas rodi (Desaadat, 2003). Dengan demikian muncul dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Urusan agama dan adat dipegang oleh desa adat, sedangkan urusan administrasi pemerintahan dilakukan oleh desa dinas. Fungsi desa dinas adalah dalam lapangan pemerintahan umum, kecuali adat dan

agama, sedangkan pengairan/ pertanian dikelola oleh Subak. Dengan demikian desa dinas dapat juga dianggap sebagai desa administrative dalam arti tertentu, karena tugasnya sekedar melaksanakan urusan administrasi pemerintahan.

Pada masa kemerdekaan (sesudah 1945) desa baru bentukan Pemerintah India Belanda yang berfungsi administrasi tetap hidup. Setelah Indonesia merdeka, Undang-undang pertama yang mengatur tentang desa adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi daerah otonom menjadi tiga tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa. Menurut Undang-undang ini, Desa merupakan daerah otonom terbawah yang menerima penyerahan urusan (kewenangan) dari pusat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, daerah otonom dibagi menjadi Swatantra Tingkat I, Swatantra Tingkat II, dan Swatantra Tingkat III, dengan suatu kelonggaran mengenai keberadaan desa sebagai daerah Swatantra III. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak menginginkan persekutuan hukum adat (desa pakraman) otomatis menjadi Daerah Swatantra III atas dasar pertimbangan faktor luas wilayah, potensi wilayah dan luasnya penduduk. Pembentuk undang-undang cenderung membikin sendiri satu wilayah otonom terbawah (Swatantra III) dengan menggabungkan beberapa kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman). Sementara itu, karena terjadi pergantian konstitusi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi wilayah Indonesia menjadi tiga tingkatan daerah otonom, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Berdasarkan

Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini Kecamatan terdiri dari satu atau lebih Desa. Desa menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman) sesuai penjelasan UUD 1945. Khusus tentang Desa, dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini desa pakraman mempunyai hubungan struktural dengan pemerintah atasan (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi). Tetapi sebelum Undang-undang ini sempat berlaku, terlebih dahulu telah ditunda pelaksanaannya dengan Instruksi Mendagri Nomor 29 Tahun 1966 dan akhirnya dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 dengan dalih undang-undang tersebut produk legislatif orde lama. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 juga mengalami nasib yang sama yakni dinyatakan tidak berlaku pada saat telah ada Undang-undang yang baru menggantikannya (Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1969). Undang-undang baru yang menggantikannya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang yang baru ini keberadaan Pemerintahan Desa diatur secara sumir yakni: “Pengaturan tentang Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan undang-undang ini, desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman) melainkan Desa sebagai wilayah administrasi di bawah Kecamatan dengan bentuk dan susunan yang seragam diseluruh Indonesia. Namun masyarakat hukum adat tetap masih diakui keberadaannya (tidak dihapuskan). Dengan demikian, Undang-undang ini menganut stelsel ganda yakni: menetapkan adanya Desa Administrasi (Desa dan

Kelurahan), disisi lain tetap mengakui adanya desa pakraman (Pasek Diantha 2001: 5-6) . Dalam masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini, Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 yang mengukuhkan secara formal keberadaan Desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Bali. Dalam Peraturan Daerah itu, ditegaskan bahwa hubungan antara desa pakraman dengan pemerintah adalah kordinatif dan konsultatif.

Perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 huruf O undang-undang ini, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan wacana yang sangat intensif dikalangan masyarakat Bali mengenai kedudukan desa pakraman dalam kerangka undang-undang yang baru ini. Inti dari wacana yang berkembang adalah munculnya tiga alternatif mengenai model desa di Bali setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu: pertama, dilakukan penyatuan dua bentuk desa di Bali (desa pakraman dan desa dinas) dengan menetapkan desa pakraman sebagai desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Alasannya, desa yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kesatuan

masyarakat hukum adat, dalam hal ini *desa* pakraman. Model kedua yang ditawarkan adalah desa dinas yang ditetapkan sebagai desa menurut undang-undang yang keberadaannya tetap berdampingan dengan desa pakraman. Dengan demikian, kondisi yang telah ada (dualisme desa) tetap dipertahankan. Alternatif ketiga yang ditawarkan adalah dikembalikannya *keperbekelan* sebagai model desa yang melaksanakan fungsi administratif disamping desa pakraman yang tetap melaksanakan fungsi-fungsi adat dan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menggantikan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 ini sendiri telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, tetapi perubahannya tidak begitu berarti karena hanya menghapuskan satu ayat dalam pasal yang berkaitan dengan pembebasan pajak tanah desa pakraman. Dengan pengertian yang tetap sama, berdasarkan peraturan daerah yang baru ini istilah desa adat diganti dengan istilah desa pakraman. Dalam realita, pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pergantian Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tidak membawa perubahan mengenai posisi desa pakraman dalam hubungannya dengan pemerintah (Pemerintahan Desa ataupun Pemerintah Daerah). Dualisme desa tetap dipertahankan. Saat ini pun, setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada perubahan substansial terhadap kondisi desa di Bali. Dualisme

pemerintahan desa tetap berlaku, desa dinas dan desa pakraman tetap eksis dengan fungsinya masing-masing.(Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Adat UNUD 2001:50-51)

Kerangka paradigmatis pengaturan politik oleh negara kolonial Belanda dilanjutkan oleh UU No. 5 Tahun 1979 yang dapat dilihat dari dua tataran. Pertama, penerusan politik dualisme desa dimana pengaturan politik yang dibangun Negara memungkinkan tetap terjadinya dualisme pengertian desa di Bali yakni desa dinas (Keperbekelan) dan desa adat (Desa Pakraman). Desa dinas dijadikan desa yang menjadi perangkat pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat. Sedangkan desa pakraman tetap mendapatkan pengakuan lewat pasal 18 UUD 45.(Dharmayuda, I.M.S., 2001)

Dalam perkembangannya, yaitu memasuki era transisi pertama ternyata persekutuan masyarakat hukum adat Bali yang mengejutkan dalam desa adat itu masih terpinggirkan karena tidak dapat ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayahnya. Lebih dari itu adanya, terutama dalam pembangunan di wilayahnya (Diantha, 2001:80). Dalam era transisi pertama ini tampaknya pemerintah pusat lebih mengarahkan pada upaya penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak yang berskala nasional.

Walaupun desa adat diakui keberadaannya, tetapi pada dasarnya negara sangat membatasi otonomi desa adat. Hal ini terlihat dari pertama, negara meletakkan pengakuan itu dalam kerangka paradigma politik developmentalisme dan integralistik. Kedua, sebagai turunan kedua paradigma ini, maka dikeluarkanlah

Peraturan Menteri Nomor Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat di tingkat Desa/Kelurahan (Dwipayana, 2003:350). Dalam Peraturan Mendagri ini terjadi kekaburan batasan antara adat istiadat, kebiasaan dan lembaga adat. Dengan demikian, adat istiadat diberi pengertian kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila. Disamping itu, dalam Peraturan Mendagri lebih digunakan istilah pembinaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya intervensi negara pada otonomi adat. Peraturan Mendagri itu dilanjutkan Pembinaan dan Pengembangan Adat di Wilayah Desa/ Kelurahan. Instruksi ini memerintahkan kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia untuk melaksanakan Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 1984.(Suacana, 2013:150-151)

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dualisme pemerintahan desa adalah dua substansi pemerintahan desa yang saling bertolak belakang dalam penjabaran tugas dan pengertiannya. Dualisme pemerintahan desa ini tidak bisa di satukan maupun dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dalam keberadaannya. Desa Pekraman yang mengatur masyarakatnya melalui Tri Hita Karana yang dimana masyarakatnya selalu menjaga hubungan harmonis dengan tuhan (parahyangan), hubungan harmonis dengan masyarakatnya (pawongan) dan hubungan harmonis dengan lingkungannya (palemahan). Desa Dinas yang notabena berkaitan dengan pemerintah daerah mengayomi warganya dalam urusan kependudukan atau kedinasan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. . Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak

akan terpenuhi, atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Maka dari itu, keberadaan dualisme pemerintahan desa ini khususnya di Bali tidak dapat di pisahkan, karena desa-desa tersebut memiliki peranan, tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan desa tersebut.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional ini disusun dengan maksud untuk mempermudah dan memperjelas arti dari masing-masing konsep atau variabel yang akan di gunakan dalam penelitian, Sehingga tidak terjadi salah tafsir dan terjadi kekeliruan dalam penelitian.

Adapun pengertian definisi konsepsional adalah “Unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang di pergunakan para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam” (Koentjaningrat)

Di bawah ini merupakan variabel dalam penelitian ini antara lain,

1. Persepsi adalah Pandangan, tanggapan dari seseorang melalui proses pengindraan terhadap segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungannya.
2. Sikap adalah sikap merupakan suatu bentuk evaluasi perasaan untuk bereaksi secara bipolar yakni positif maupun negatif terhadap objek tertentu yang dibentuk dari interaksi antara komponen kognitif, afektif, dan konatif.
3. Mahasiswa adalah kelompok muda golongan kritis, universal, menggunakan rasionalitasnya dalam melihat permasalahan atau fakta yang di di depannya.

Dari akalnya, atau proses berpikirnya dengan menggunakan informasi awal yang diterima semenjak di bangku Sekolah dan pengalaman hidup membuat kehidupan mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah kabupaten.
5. Dualisme Pemerintahan Desa adalah dua substansi desa yang saling bertolak belakang dalam penjabaran tugas dan pengertiannya. Dualisme pemerintahan desa ini tidak bisa di satukan maupun dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dalam keberadaannya namun apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Desa Pekraman yang mengatur masyarakatnya melalui tri hitakarana yang dimana masyarakatnya selalu menjaga hubungan harmonis dengan tuhanya (parahyangan), hubungan harmonis dengan masyarakatnya (pawongan) dan hubungan harmonis dengan lingkungannya (palemahan). Desa Dinas yang notabena berkaitan dengan pemerintah daerah mengayomi warganya dalam urusan kependudukan atau kedinasan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Maka dari itu, keberadaan dualisme desa ini khususnya di Bali tidak dapat di pisahkan,

karena desa-desa tersebut memiliki peranan, tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan desa tersebut.

6. Persepsi dan sikap mahasiswa terhadap dualisme pemerintahan Desa adalah Pandangan, tanggapan dan bentuk evaluasi perasaan untuk bereaksi secara bipolar yakni positif maupun negatif terhadap objek tertentu yang dibentuk dari interaksi antara komponen kognitif, afektif dari seseorang mahasiswa melalui proses pengindraan terhadap dua substansi desa yang saling bertolak belakang dalam penjabaran tugas dan pengertiannya.

G. Definisi operasional

Definisi operasional mengandung pengertian mendefinisikan variabel-variabel penelitian dalam bentuk operasional yang mencakup dimensi-dimensi yang diharapkan dapat ditentukan alat ukur yang cocok untuk digunakan.

1. Persepsi Mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan Desa Pekraman dan Desa Dinas di Bali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat diukur dari:
 - 1.1. Aspek pandangan dan tanggapan
 - a) Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.
 - b) Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang dualisme desa.
 - c) Bagaimana tanggapan mahasiswa tentang konflik yang terjadi antara desa pekraman dan desa dinas.

- d) Bagaimana pandangan mahasiswa tentang fungsi dan wewenang masing-masing desa.
 - e) Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang desa tersebut.
 - f) Bagaimana pandangan mahasiswa tentang perkembangan peraturan yang mengatur tentang keberadaan desa tersebut.
2. Sikap Mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan Desa Pekraman dan Desa Dinas di Bali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat di ukur dari:
- 2.1 Komponen kognitif, adalah komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap
- a) Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.
 - b) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang dualisme desa.
 - c) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang konflik yang terjadi antara desa pekraman dan desa dinas.
 - d) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang konflik yang terjadi antara desa pekraman.
 - e) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang fungsi dan wewenang masing-masing desa.

f) Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang desa tersebut.

g) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan desa tersebut.

h) Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan peraturan yang mengatur tentang keberadaan desa tersebut.

2.2 Komponen afektif, adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap.

a) Tingkat perasaan mahasiswa terhadap undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

b) Tingkat perasaan mahasiswa tentang dualisme desa.

c) Tingkat perasaan mahasiswa tentang konflik yang terjadi antara desa pekraman dan desa dinas.

d) Tingkat perasaan mahasiswa tentang fungsi dan wewenang masing-masing desa.

e) Tingkat perasaan mahasiswa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang desa tersebut.

f) Tingkat perasaan mahasiswa tentang perkembangan peraturan yang mengatur tentang keberadaan desa tersebut.

2.3 Komponen konatif, adalah komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap.

- a) Tingkat penilaian mahasiswa terhadap undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b) Tingkat penilaian mahasiswa tentang dualisme desa.
- c) Tingkat penilaian mahasiswa tentang konflik yang terjadi antara desa pekraman dan desa dinas.
- d) Tingkat penilaian mahasiswa tentang fungsi dan wewenang masing-masing desa.
- e) Tingkat penilaian mahasiswa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang desa tersebut.
- f) Tingkat penilaian mahasiswa tentang perkembangan peraturan yang mengatur tentang keberadaan desa tersebut.

H. Metode Penelitian

Sebelum peneliti menyampaikan metode yang di gunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu akan di bahas pengertian metode itu sendiri. Menurut Drs. Wardalis dalam buku yang berjudul metode penelitian suatu pendekatan proposal mengartikan bahwa: “metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian yang diartikan supaya sadar , hati-hati dan sistematis untuk menyebutkan kebenarannya”.

1. Penentuan populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam menentukan populasi tidak saja berupa manusia tetapi juga alat, keadaan, tempat dan sebagainya.

Menurut Usman Tampubolon populasi adalah “suatu yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadi tempat generalisasi penemuan penelitian”. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan populasi adalah keseluruhan individu yang dijadikan obyek penelitian.

Jadi dengan demikian jelaslah populasi adalah keseluruhan individu yang dijadikan objek penelitian, adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Universitas Warmadewa per maret 2015 yang jumlahnya 6.011 orang, dengan perincian masing – masing fakultas sebagai berikut : Fakultas Ekonomi 3.106 orang, Fakultas Hukum 964 orang, Fakultas Sastra 507 orang, Fakultas Fisip 185 orang, Fakultas Pertanian 187 orang, Fakultas Teknik 672 orang, Fakultas Kedokteran 390 orang

b. Sampel

Sampel adalah contoh atau bagian dari suatu populasi. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh bagian informasi yang akan dijadikan data. Sedangkan untuk menunjukan besar kecil yang harus di ambil dari sebagian populasi sebenarnya belum ada ketentuanyang mutlak dan pasti.

Selanjutnya mengenai besar dan kecilnya dalam menentukan sampel maka Sutrisno Hadi menyatakan bahwa: “ sebenarnya tidak ada suatu ketentuan ketetapan yang mutlak berapa persen sampel yang harus di ambil dalam populasi ketiga tetapan yang mutlak itu tidak perlu menimbulkan keraguan seorang penyidik”.

Di dalam buku metodologi research Prof.Drs. Sutrisno Hadi MA, mengatakan bahwa proposional sampel adalah populasi terdiri dari beberapa sub populasi yang tidak homogen dan tiap-tiap sub populasi akan di wakili dalam penyelidikan.

Dalam pengambilan sampel peneliti mempergunakan research poporsi, Sutrisno Hadi mengatakan :proposal sampel adalah populasi terdiri dari beberapa sub populasi akan mewakili dalam penyelidikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi-subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proportional. Dalam hal ini ada beberapa sampel yang bersifat ganjil akan di tambah atau di kurangi jumlahnya tetapi tidak melebihi kuota sampel.

Untuk menentukan besarnya sample yang akan digunakan agar data representatif dalam hal ini penulis menggunakan rumus dari Frank Linch dengan sampling error : 0,01. Adapun rumus tersebut adalah :

$$n = \frac{N^2 \cdot P (1 - P)}{Nd^2 + 2^2 \cdot P (1 - P)}$$

Keterangan :

n = banyaknya jumlah sample

N = jumlah populasi

2 = nilai normal dari variable untuk tingkat kepercayaan 0,95 (1,96)

P = harga patokan tertinggi 0,50

d = sampling error (0,10)

maka :

maka :

$$\begin{aligned} n &= \frac{6.011 (1,96)^2 \cdot (0,50) (1 - 0,50)}{6.011 (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot (0,50) (1 - 0,50)} \\ &= \frac{6.011 (3,84) \cdot (0,25)}{6.011 (0,01) + (3,84) \cdot (0,25)} \\ &= \frac{5.770,56}{61,07} \end{aligned}$$

$$= 94,49$$

$$= 94 \text{ Orang}$$

Jadi, banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 94 orang. Maka dibawah ini peneliti membuat daftar sampel berdasarkan jumlah mahasiswa per Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa.

Tabel 1
Jumlah sampel yang diambil dari masing-masing fakultas

no	Fakultas	Jumlah sampel	total
1	Fakultas Ekonomi	$\frac{3.106}{6.011} \times 94 = 48,57 = 49$	49
2	Fakultas Hukum	$\frac{964}{6.011} \times 94 = 15,07 = 15$	15
3	Fakultas Sastra	$\frac{507}{6.011} \times 94 = 7,92 = 8$	8
4	Fakultas Fisip	$\frac{185}{6.011} \times 94 = 2,89 = 3$	3
5	Fakultas Pertanian	$\frac{187}{6.011} \times 94 = 2,92 = 3$	3
6	Fakultas Teknik	$\frac{672}{6.011} \times 94 = 10,50 = 10$	10
7	Fakultas Kedokteran	$\frac{390}{6.011} \times 94 = 6,09 = 6$	6
	Jumlah		94

Sumber : Data bagian kemahasiswaan Universitas Warmadewa tahun ajaran 2014-2015

2. Metode pengumpulan data.

Untuk memudahkan memperoleh data, maka metode pengumpulan data yang di pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode observasi

Observasi adalah terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan.

b. Kuisoner

Kuisoner adalah sejumlah pertanyaan yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.

3. Teknik Prosedur dan Analisa Data

Teknik dan prosedur analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dipadukan dengan teknik analaisis kuantitatif, dimana teknik analisis data kualitatif yaitu analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara simultan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tiga alur yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif tersebut, yakni sebagai berikut :

- a) Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan dilapangan. Melalui reduksi data ini diharapkan dapat menemukan fenomena-fenomena yang menjadi pokok-pokok temuan dari wawancara.
- b) Penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data atau informasi. Penyajian data ini berfungsi untuk menyusun data atau informasi dalam bentuk yang terpadu agar dengan mudah dapat dilihat apa yang sedang terjadi atau yang ditemui dalam penelitian.
- c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan mengembangkan jaringan hubungan dalam rangka perumusan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya mengenai ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel.

Sedangkan analisis data dengan metode analisis kuantitatif adalah penetapan skor, interval, dan pengkatagorian. Analisis ini dipakai untuk mengetahui jawaban responden dari pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner dari variabel penelitian.

Sebelum data analisis, terlebih dahulu ditentukan masing-masing jawaban yang diberikan skor 1,2, dan 3. Adapun pemberian skor untuk setiap pertanyaan tersebut dipergunakan skala :

Untuk pertanyaan dengan nomor ganjil ;

- a. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban a diberi skor 3;
- b. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban b diberi skor 2;
- c. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban c diberi skor 1;

Sedangkan untuk pertanyaan dengan nomor genap;

- a. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban a diberi skor 1;
- b. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban b diberi skor 2;
- c. Bagi responden yang menjawab pertanyaan dengan jawaban c diberi skor 3;

Untuk dapat menentukan apakah kategori jawaban termasuk kategori tinggi, sedang atau rendah, maka terlebih dahulu ditentukan intervalnya dengan ketentuan bahwa skor tertinggi dikurangi skor terendah selanjutnya dibagi dengan banyaknya alternatif jawaban itu, sehingga dapat ditentukan kriteria rata-rata skor

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah alternatif}} \\ &= \frac{3 - 1}{3} \\ &= 0,66 \end{aligned}$$

Dari besarnya interval 0,66 tersebut , maka jawaban dapat ditentukan rata-rata skornya, sehingga kategori dapat diketahui dengan kriteria tersebut:

$1,00 - 1,66 = \text{rendah}$

$1,67 - 2,33 = \text{sedang}$

$2,34 - 3,00 = \text{tinggi}$

Analisis data dengan metode analisis kualitatif adalah penetapan kategori dan kemudian menyajikan dan menggariskannya. Kualitas pada penelitian kualitatif mengarah pada “apa, bagaimana, kapan, dan dimana tentang sesuatu”. Dengan demikian, penelitian kualitatif mengarah pada makna, konsep, definisi, karakteristik, simbol dan deskripsi tentang sesuatu. Penelitian kualitatif meliputi partisipasi lapangan yang intensif dan relatif lama. Merekam secara cermat apa yang terjadi dilapangan dengan menggunakan catatan terhadap dokumen dan tertulis, interview, refleksi analisis terhadap rekaman dari lapangan, melaporkan hasil dengan deskripsi yang detail, kutipan-kutipan langsung dengan hasil wawancara dan komentar interpretatif.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Selanjutnya, data dideskripsikan dengan membangun kategori yang menempatkan perilaku atas proses yang terjadi dengan mengorganisir data seputaran topik atau pertanyaan pokok. Langkah ini disebut reduksi data yakni pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang diperoleh dilapangan.

Reduksi data karenanya juga merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain adalah pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema atau polanya sehingga membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai suatu bentuk analisis, reduksi data juga akan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan. Keseluruhan langkah-langkah tersebut dapat menyederhanakan seluruh data lapangan yang terkumpul, menyajikannya secara sistematis, kemudian mengolah, menafsirkan dan memaknai data tersebut.

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan menggabungkan cara formal (membuat berbagai macam matriks, grafik, bagan, tabel, network atau charts) dan informal (naratif) supaya dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan. Dengan cara-cara itu data dapat dipaparkan dengan baik dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Penyajian data sejatinya merupakan tahapan dalam analisis data.

Setelah data dibuat dalam bentuk tabel misalnya, perlu diberikan penjelasan yang terperinci dengan cara: mendiskusikan tabel tersebut dan memberikan penafsiran terhadap data tersebut. Mendiskusikan tabel tidak lain dari memaparkan data dengan sedikit lebih tanggung dan memberi perhatian yang lebih tanggap terhadap perbedaan-perbedaan atau hubungan-hubungan yang menyolok dari angka-

angka dalam tabel. Setelah mendiskusikan tabel, tahap berikutnya adalah memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian (Nazir, dalam I Wayan Gede Suacana, 2007:150-151).

Sebagai sebuah penelitian dengan teknik analisis data kualitatif, maka data lebih banyak disajikan secara deskriptif/naratif atau dengan uraian kata-kata. Teknik penyajian lain seperti bagan, tabel atau grafik hanya dipergunakan jika berkaitan dengan data yang rumit yang membutuhkan pemadatan, dan secara kronologis jika berkaitan dengan pernyataan-pernyataan verbal. Setelah menyajikan analisis dan interpretasi data kemudian diambil simpulan dan verifikasi. Simpulan pada mulanya bersifat dangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka simpulan itu lebih “grounded”. Simpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan secara singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan untuk mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya untuk mencapai “inter subjective consensus” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “confirmability”

Dalam proses pengambilan simpulan ini perlu diperhatikan aspek “corroboratiaon” yang bertujuan bukan untuk mencocokkan apakah persepsi orang telah akurat atau merupakan refleksi yang benar tentang suatu keadaan dilapangan, tetapi menolong peneliti agar yakin bahwa penemuan yang diperolehnya benar-benar telah merefleksikan secara tepat persepsi orang yang diteliti. Untuk tujuan tersebut

metode yang sering dipergunakan adalah triangulasi seperti yang dikemukakan dalam tahap sebelumnya yaitu sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, yang bertujuan agar peneliti dapat mendorong atau menjaga kualitas penelitian menghilangkan tuduhan bahwa penelitian ini hanya didasarkan satu metode saja, satu sumber data saja, atau hanya memuat bias yang dimiliki peneliti tunggal.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Universitas Warmadewa Denpasar.

Pada Rapat Kerja Daerah Korpri Bali di Kerta Sabha tanggal 12 Nopember 1983, Ketua Unit Korpri Universitas Udayana Drs. Putu Kuna Winaya mengusulkan pendirian Universitas Korpri, dimana dalam penyelenggaraan kelak dilandasi prinsip biayaterjangkau dan mutu terjamin. Usulan pendirian Universitas Korpri ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi pada Perguruan Tinggi Negeri waktu itu. Setelah mendapat ijin Korpri Pusat, Ketua Pengurus Korpri Bali (Drs. Sembah Subhakti) dan Ketua Korpri Unit Universitas Udayana (Drs. Putu Kuna Winaya) sepakat untuk mendirikan Universitas Korpri.

B. Lambang, Visi dan Misi Universitas Warmadewa

Universitas Warmadewa yang memiliki motto: "Guna Widya Sewaka Nagara" memiliki 14 Program Studi Sarjana (S1) dan 3 Program Pascasarjana (S2) yaitu: Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Linguistik yang telah memiliki Ijin Operasional. Sedangkan Program Studi S1 Psikologi, S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) dan Magister Administrasi Publik (MAP) sedang dalam proses pengusulan ke Dikti Kemendikbud RI.

Lambang Universitas Warmadewa terdiri dari lima (5) unsur yaitu unsur sayap, buku, guci, prabu manusia dan padma.

Arti dari masing-masing lambang adalah :

1. Sayap : Melambangkan kekuatan, kesanggupan serta dinamika Lambang ini diambil dari unsur lambang Korpri sebagai pendiri Universitas Warmadewa dan merupakan dasar kekuatan yang kokoh.
2. Buku : Melambangkan Pustaka Ilmu, merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan.
3. Guci : Melambangkan wadah yang mengandung widya maha merta yang merupakan sumber untuk mewujudkan sarjana-sarjana yang sujana.
4. Prabu Manusa dengan Kembang Bajra : Melambangkan Sarjana yang sujana dengan Kembang Bajra / Tri Kona yang melambangkan pemikir yang berkepribadian tinggi.
5. Padma : Melambangkan Sarjana yang sujana dengan Kembang Bajra/ Tri Kona yang melambangkan pemikir yang berkepribadian tinggi. Kesatuan dan susunan kelima unsur tadi melambangkan bahwa Universitas Warmadewa bertekad mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi seni unruk membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Warmadewa

1. Visi

Menjadikan Universitas Warmadewa sebagai pusat pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

2. Misi

- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas memiliki etika akademik.

- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga, di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi,
- Mengembangkan organisasi Universitas Warmadewa dalam rangka penguatan kelembagaan
- Mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana
- Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi segenap civitas akademika
- Meningkatkan kesejahteraan civitas akademika Universitas Warmadewa.

3. Tujuan :

- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki etika akademik.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Mewujudkan dan merealisasikan kerjasama dengan berbagai Instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri, guna meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Mewujudkan organisasi Universitas Warmadewa sebagai institusi ilmiah yang mandiri .
- Terselenggaranya layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi dengan berbasis teknologi informasi (TI)
- Meningkatkan kesadaran civitas akademika akan pentingnya kehidupan yang harmonis

- Mewujudkan jiwa dan sikap kemandirian dalam dunia kerja
- Meningkatkan secara bertahap kesejahteraan karyawan/civitas akademika mendekati PNS untuk dapat meningkatkan mutu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

4.Sasaran :

- Dihasilkannya lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan berkarakter kebangsaan
- Dihasilkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung proses pembelajaran serta bermanfaat bagi masyarakat
- Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak didalam dan luar negeri dan terealisasinya peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Terwujudnya Universitas Warmadewa yang bernuansa akademik kondusif,akuntabel dan demokratis
- Dihasilkannya layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi prima yang berbasis teknologi informasi.
- Terciptanya harmonisasi kehidupan kampus berlandaskan konsep THK
- Dihasilkannya civitas akademik yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan
- Meningkatnya kesejahteraan civitas akademika Unwar

C. Periodesasi Pimpinan Universitas Warmadewa.

Universitas Warmadewa dipimpin oleh seorang Rektor dan sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1990 dan PP No. 60 Tahun 1999, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor masing-masing di bidang Akademik (Wakil Rektor 1), Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Wakil Rektor II) dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III). Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Rektor juga dibantu oleh para Dekan (Pimpinan Fakultas) serta Pimpinan Unit dan Sub Unit Kerja.

Sejak berdirinya Universitas Warmadewa tahun 1984, Universitas Warmadewa telah mengalami pergantian kepemimpinan sebagai berikut :

1. Periode 1984 - 1987

Rektor : Prof. dr. I G.A.G. Puthra (Alm)

PR I : Drs. I Wayan Rendha (Alm)

PR II : Drs. Sembah Subhakti

PR III : I Wayan Waya, S.H.

2. Periode 1987 -1990

Rektor : Prof. Putu Kuna Winaya, S.E. (Alm)

PR I : Drs. I Wayan Rendha (Alm)

PR II : Drs. Sembah Subhakti

PR III : I Wayan Waya, S.H.

3. Periode 1990 - 1994

Rektor : Prof. Ir. Putu Djapa Winaya, M.Sc.

PR I : Drs. I Wayan Rendha (Alm)

PR II : Drs. Sembah Subhakti

PR III : I Wayan Waya, S.H.

Wakil PR I : Ir. I Ketut Sugihantara

Wakil PR II : I Gusti Ngurah Wijaya, S.E.

Wakil PR III: I Nyoman Suendra DA, S.H.

4. Periode 1994 - 1998

Rektor : Prof. dr. I.G.A.G. Puthra (Alm)

PR I : Ir. I Ketut Sunadra, M.Si

PR II : Drs. I Wayan Arjana

PR III : Ir. I Gusti Made S. Diarsa

5. Periode 1998 - 2003

Rektor : Prof. Dr. Nyoman Sutawan

PR I : Ir. I Putu Gde Suranata, MT

PR II : I Made Sara, SE, MP.

PR III : Ir. I Gst. Made S.Diarsa, MT

6. Periode 2003 – 2007

Penjabat Rektor : I Wayan Waya, SH (3 bulan)

Rektor : Prof. dr. I B Tjitarsa, MPH (alm)

PR I : Ir. I Putu Gde Suranata, MT

PR II : I Wayan Gede Merta, SE. M.Si

PR III : I Nyoman Putu Budiarta, SH, MH

7. Periode 2007 - 2011

Rektor : Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.,MS.

PR I : Dr. Nyoman Kardana, M.Hum.

PR II : IB. Udayana Putra, SE, M.M

PR III : Ir. A.A.Ngr. Mayun Wirajaya, MM

8. Periode 2011-2015

Rektor : Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE.,MS.

PR I : Dr. Nyoman Kardana, M.Hum.

PR II : IB. Udayana Putra, SE, M.M

PR III : Ir. A.A.Ngr. Mayun Wirajaya, MM

D. Yayasan dan Universitas

Yayasan kesejahteraan Korpri Propinsi Bali sebagai pengayom dan pendiri Universitas Warmadewa ditetapkan berdirinya secara de jure pada tanggal 12 Oktober 1984 sesuai dengan SK dewan pembina Korpri propinsi Bali No. 57/Wan-Prov/X/KP/1984 yang kemudian dituangkan dalam akta notaris No. 83 pada tanggal 22 Oktober 1984.

Walaupun secara de facto yayasan telah mulai mempersiapkan keberadaannya jauh-jauh sebelum ditetapkan pendiriannya, sesuai dengan anggaran dasar bahwa yayasan telah mulai berjalan pada tanggal 17 Juli 1984.

- a. Yayasan ini berazaskan dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Tujuan yayasan dibidang pendidikan (tinggi) adalah membantu pemerintah Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.
- c. Pendiirian dan pengurus yayasan:

Para pendiri:

- 1) Drs. Sembah Subhakti.

- 2) Prof. Putu Kunawinaya, SE (Alm)
- 3) Ketut Widjana, SH
- 4) Wayan Waya, SH

PIMPINAN YAYASAN:

Dewan Pembina Yayasan:

Ketua : Made Jendra, SH

Anggota : Drs. I Nyoman Yasa, M.Si

Drs. N. Sembah Subhakti

Prof. Dr. I Gede Parimatha, MA

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, M.Si

I Wayan Waya, SH

Pengurus Yayasan :

Ketua :Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si

Wakil Ketua :Ir. I Ketut Sugihantara, MSA

Sekretaris :Benyamin Thomas Sanger, SH, MH

Bendahara :Cok. Istri Raka Indrawati, SE

Pengawas :Dr. Ir. I Gusti Made Putra, M.Si

E. Universitas

Pada bulan Juni 1984 dilakukan langkah persiapan menyusun proposal pendirian Universitas Korpri di Bali dengan melibatkan unsur Korpri Universitas Udayana dan Korpri Pemda, sekaligus menyiapkan Badan Pendiri Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang terdiri dari Drs. Sembah Subhakti, Drs.

Putu Kuna Winaya, I Ketut Widjana, SH, dan I Wayan Waya, SH. Tanggal 17 Juli 1984, Universitas Warmadewa resmi didirikan dan kepengurusan yayasan ditetapkan sususnannya pada rapat Korpri Bali tanggal 30 Juli 1984. Setelah kelengkapan badan-badan yayasan terbentuk, selanjutnya dilaporkan kepada kopertis wilayah VIII, bahwa Universitas Korpri telah berdiri dengan nama Universitas Warmadewa. Nama Universitas Warmadewa diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang waktu itu dijabat Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, sebagai bentuk apresiasi terhadap Raja Bali zaman sebelum Majapahit dari Dinasti Warmadewa.

Pada tanggal 15 Agustus 1984 Prof. dr I Gusti Agung Gde Puthra di tetapkan sebagai rektor pertama Universitas Warmadewa. Perkuliahan perdana dilakukan di halaman Kampus Unud pada tanggal 17 September 1984 yang sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Universitas Warmadewa.

Sesuai SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali no 05/yas.Korp/VII/84, universitas warmadewa terdiri dari 6 fakultas dan 1 pendidikan non-gelar. Dalam perkembangan selanjutnya koordinator Kopertis Wilayah VIII memberi persetujuan pembukaan unit-unit fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Warmadewa dan memeberi ijin oprasi terhadap 18 program studi yang diasuh dengan surat No. 187/kop.VIII/B/02/1985 tanggal 10 November 1985.

Sejak 25 November 1986 sesuai dengan SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0825/0/1986 telah di tetapkan status terdaftar bagi ke 6 fakultas dan terahir berdasarkan SK Mendigbud RI No. 455/0/1991 tanggal 8

Agustus 1991, No 0641/0/1991 tanggal 13 Desember 1992 serta SK Dirjen Dikti No. No. 81/kep/1992 tanggal 2 April 1992 seluruh fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Warmadewa telah berstatus diakui.

Universitas Warmadewa mempunyai 205 orang dosen tetap yayasan, 59 orang dosen Kopertis VIII dan 150 oarng dosen luar biasa dari PTN, instansi pemerintah serta swasta serta didukung oleh 123 orang tenaga administrasi. Kualifikasi dosen yang dimiliki: 6 orang Guru Besar, 10 orang Doktor, 192 orang Magister dan sedang menempuh S2 18 orang, serta S3 30 orang.

Tabel 2
Program Studi Yang terdapat di universitas Warmadewa Denpasar

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	Nomor SK Akreditasi	TANGGAL BERLAKU		STATUS AKREDITASI
				MULAI	SAMPAI	
1	Ilmu Hukum	S1	002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009	2-04-2009	2-04-2014	B
2	Ekonomi Pembangunan	S1	174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013	24-08-2013	24-08-2018	B
3	Manajemen	S1	091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013	21-02-2013	21-02-2018	B
4	Akuntansi	S1	002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009	2-04-2009	2-04-2014	B
5	Sastra Inggris	S1	016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009	26-06-2009	26-06-2014	B
6	Ilmu Pemerintahan	S1	197/BAN-PT/Ak-XVI/S1/IX/2013	26-09-2013	26-09-2018	B
7	Ilmu Administrasi Negara	S1	197/BAN-PT/Ak-XVI/S1/IX/2013	26-09-2013	26-09-2018	B
8	Agrotektologi	S1	001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009	14-03-2009	14-03-2014	C
9	Ilmu dan Teknologi Pangan	S1	001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009	14-03-2009	14-03-2014	C
10	Peternakan	S1	211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/X/2013	19-10-2013	19-10-2018	B
11	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	4-02-2011	4-02-2016	B
12	Teknik Sipil	S1	024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013	25-01-2013	25-01-2018	B

13	Arsitektur	S1	010/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009	23-05-2009	23-05-2014	C
15	Pendidikan Dokter	S1	032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012	18-10-2012	18-10-2017	C
16	Magister Manajemen *	S2				Sedang Proses
17	Magister Ilmu Hukum *	S2				Sedang Proses
18	Magister Linguistik *	S2				Sedang Proses

Sumber : <http://www.warmadewa.ac.id/>

Unwar memiliki 14 Progam studi Sarjana Strata 1 dan 3 Program Pasca Sarjana : Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, Magister Linguistik yang telah memiliki Ijin Operasional, Program Studi di lingkungan Universitas Warmadewa juga telah mendapatkan terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut :

Disamping telah memiliki Ijin Operasional, Program Studi di lingkungan Universitas Warmadewa juga telah mendapatkan terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut :

Keterangan : * Baru memiliki ijin penyelenggaraan Program Studi

Universitas Warmadewa dipimpin oleh seorang rektor dan sesuai dengan PP No.30 Tahun 1990 rektor dibantu oleh tiga orang pembantu rektor masing-masing dibidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan. Disamping itu juga dibantu oleh para dekan dan pimpinan sub unit kerja dilingkungan Universitas Warmadewa.

F. Tugas dan Fungsi

1. Senat Universitas

Suatu badan normatif dan merupakan lambang perwakilan tertinggi di perguruan tinggi dan lingkungan universitas. Senat perguruan tinggi atau senat universitas, beranggotakan para guru besar, pimpinan universitas, dekan dan wakil dekan. Rektor sebagai ketua senat yang dibantu oleh sekretaris yang dipilih dari anggota senat.

Tugas Senat Universitas adalah:

- Merumuskan kebijakan akademis dan perkembangan Perguruan Tinggi.
- Merumuskan kebijakan penilaian Prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan belanja perguruan tinggi oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Menilai pertanggungjawaban pimpinan Perguruan Tinggi atas kebijakan yang telah ditetapkan.
- Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas rektor.
- Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademik.
- Mengukuhkan pemberian Doktor Kehormatan pada Universitas/Institut yang memenuhi syarat.

2. Unsur Pimpinan (Rektor/Ketua/Direktur dan sejumlah pembantu rektor) bertanggung jawab mengenai pengelolaan perguruan tinggi, menjabarkan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pengelolaan yang mengikat semua pihak di perguruan tinggi dalam sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana. Unsur pimpinan perguruan tinggi bersama dengan senat perguruan tinggi mrnjabarkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan yang mengikat semua pihak di perguruan tinggi dengan pimpinan unsur pelaksanaan akademik (dekan dan ketua lembaga) membuka forum rapat pimpinan.
3. Dewan Penyatu yang terdiri dari tokoh masyarakat, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan masalah perguruan tinggi bersangkutan, kenaggotaan dan kepengurusannya dipilih oleh dan dari anggota dewan penyatu.
4. Unsur pelaksanaan administrasi, merupakan perangkat yang menyelenggarakan keseluruhan pelayanan teknis dan administrasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan program P3M (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat). Keseluruhan pelayanan teknis dan administrasi tugas dan fungsi serta tanggungjawab terbagi habis dalam sejumlah biro yang jumlahnya disesuaikan dengan volume pekerjaan masing-masing perguruan tinggi diantaranya adalah biro atau bagian akademik, bagian umum, bagian perlengkapan, bagian kepegawaian dan bagian keuangan.

5. Unsur pelaksanaan akademik yaitu fakultas (di universitas) sebagai salah satu induk organisasi beserta satuan-satuan dibawahnya (jurusan, laboratorium/studio). Lembaga penelitian, pengabdian, program pasca sarjana mempunyai tingkat kedudukan setara dengan pimpinan fakultas (dekan), ketua program bertanggung jawab kepada rektor, dekan/ketua jurusan.
6. Perpustakaan merupakan sarana yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi untuk membantu mahasiswa mendapatkan referensi atau bahan acuan dalam perkuliahan atau dapat juga dikatakan bahwa perpustakaan secara langsung menunjang proses belajar mengajar
7. Pusat Komputer merupakan suatu organisasi yang secara khusus dibentuk untuk secara langsung menunjang suatu kegiatan tertentu dalam melaksanakan fungsi akademik.
8. Tata Usaha merupakan badan yang dibentuk untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di perguruan tinggi.
9. Senat mahasiswa perguruan tinggi, merupakan suatu badan yang dibentuk guna menampung segala aspirasi mahasiswa di perguruan tinggi.
10. BAAK merupakan suatu badan yang mempunyai fungsi diantaranya adalah menyusun konsep kalender kegiatan akademik untuk dikonsultasikan pada rektor/pembantu rektor I, mengadakan dan menyampaikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan universitas Warmadewa dan kepada mahasiswa saat dilakukan registrasi, mengkoordinasikan jadwal perkuliahan dan praktikum yang disusun bersama antara unit kerja yang terkait bila

dibutuhkan ruangan untuk keperluan lain, maka unit kerja yang membutuhkan agar berkonsultasi pada BAAAK atau bagian akademik atau mohon izin pada rektor dengan tembusan pada bagian perlengkapan. Penyelenggaraan rapat-rapat pengelolaan data untuk mengkoordinasikan konsep perkuliahan atau praktikum.

G. Kampus dan Fasilitas Universitas

Kampus Warmadewa terletak di Jalan Terompong 36 Tanjung Bungak, Denpasar dengan luas wilayah kurang lebih 5 Ha terdiri dari 3 (tiga bangunan) yaitu:

1. Komplek Bangunan Timur terdiri dari :
 - a. Gedung Unit I. 3(tiga) lantai digunakan untuk:
 - 1) Ruang Sekretariatan Fakultas hukum di lantai tiga
 - 2) Ruang Kuliah dilantai dasar yang terdiri dari tiga kelas dan dua kelas dapat digunakan sebagai auditorium.
 - b. Gedung Unit II. 4 (empat) lantai digunakan untuk:
 - 1) Ruang perpustakaan dan ruang sidang di lantai empat
 - 2) Ruang kuliah FE dilantai dua
 - 3) Ruang sekretariat FE dilantai satu
 - c. Ruang tambahan yang digunakan:
 - 1) Wantilan
 - 2) Koperasi Nasuki
 - 3) Ruang SEKOM-Unwar dan KORMAS/BEM 7 unit

4) Ruang Rektorat

2. Komplek Barat terdiri dari 15 unit yang digunakan:
 - a. Satu unit ruang pos dan sekretariat perkuliahan serta sekretariat Unitas KSR dan Mapala.
 - b. Satu unit gedung laboratorium kedokteran
 - c. Satu unit gedung lantai tiga yang di sana merupakan sekretariat fakultas Kedokteran dan ruang kuliah
 - d. Satu unit klinik warmadewa dan di lantai tiga terdapat satu buah auditorium kedokteran
 - e. Satu unit gedung lantai tiga yang di lantai dasar terdapat tiga sekretariat yakni F Fisip, F Sastra, F Teknik di lantai dua dan tiga adalah ruang perkuliahan.
3. Komplek Utara terdiri dari 2 gedung, satu unit ruang sekretariat perkuliahan, satu unit gedung Pasca Sarjana dan satu unit Bank BPD Kas Unwar, satu unit Pos Menwa/Keamanan dan satu unit rumah kaca yang digunakan oleh fakultas Pertanian. Dilengkapi dengan areal parkir yang memadai dan pertamanan di lingkungan kampus universitas Warmadewa pada tahun 2014/2015 Universitas Warmadewa memiliki mahasiswa terdaftar sejumlah 6.011 orang dan telah mampu mewisuda sarjana sejumlah 23.000 orang yang diasuh oleh 178 orang-orang tenaga edukatif tetap Yayasan, 48 orang tenaga edukatif perbantuan Kopertis Wilayah III dan sekitar 194-313 orang tenaga luar biasa senior dari Unud, UGM, Unibraw

maupun intensitas lain. Setiap tahun Universitas Warmadewa berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

H. Kemahasiswaan

Jumlah Mahasiswa Universitas Warmadewa tahun akademik 2014/2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Mahasiswa Universitas Warmadewa tahun akademik 2014/2015

No	Fakultas	Jumlah
1	Hukum	964
2	Ekonomi	3.106
3	Sastra	507
4	Teknik	672
5	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	185
6	Pertanian	187
7	Kedokteran	390
	Jumlah	6.011

Sumber: Bagian Kemahasiswaan Universitas Warmadewa Tahun Ajaran 2014/2015

Berbagai prestasi sempat diraih oleh mahasiswa Unwar dalam event olahraga maupun seni serta prestasi akademik diantaranya :

1. Juara II Mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis Wilayah VIII Tahun 2010 atas nama Putu Eny Suhardiyani dari Fakultas Teknik.
2. Duta Bali dalam Pertukaran Pemuda dan Kebudayaan se Provinsi Kalimantan dan Papua 2010.

3. Peringkat 9 dalam Kompetisi Debat Nusantara Bagi Anak Bangsa yang dilaksanakan oleh Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 2010 oleh I Putu Eka Mahardika dari Fisipol.
4. Finalis Putra Kampus Ajeg Bali 2010 oleh I Gede Dio Wikranta dari Fakultas Ekonomi.
5. Juara III Judo kelas 73 Kg dalam Kejurnas Mahasiswa di GOR Pajajaran Bandung oleh I Kadek Adi Wirawan dari Fakultas Ekonomi.
6. Juara Umum III Kejurnas Piala Bergilir Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dalam Langgam Indonesia 2010 oleh Unitas Marching Band.
7. Juara I Mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis Wilayah VIII Tahun 2011 atas nama I Made Wimas Candranegara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
8. Juara I Mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis Wilayah VIII Tahun 2012 atas nama Ayu Putu Harina Ferdiyanthi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
9. Tahun 2013 Juara II Mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis Wilayah VIII atas nama Ni Putu Eka Kristi Permatasari dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
10. Penghargaan dan Hibah Bidang Penjaminan Mutu yang diterima oleh Universitas Warmadewa Tahun 2010 s.d. 2013

Tabel 4
Penghargaan dan Hibah Bidang Penjamin Mutu Universitas Warmadewa

No	Jenis Penghargaan/ Hibah	Lembaga Pemberi	Tahun
1.	Penghargaan atas Keberhasilan Universitas Warmadewa dalam Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional	2010
2.	<i>Award Gold Medal</i> kepada Universitas Warmadewa atas Keberhasilan Meraih Akreditasi Program Studi yang Dimiliki dengan Indeks Prestasi 3,43	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII A Bali	2011
3.	Hibah Pengembangan Penjaminan Mutu pada Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Warmadewa	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional	2012
4.	<i>Award Silver Medal</i> kepada Universitas Warmadewa atas Keberhasilan Meraih Akreditasi Program Studi yang Dimiliki dengan Indeks Prestasi 230,824	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII A Bali	2012
5.	Penghargaan atas Keberhasilan Universitas Warmadewa sebagai Juara I Lomba <i>Quality Assurance</i> bagi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII Bali Nusa Tenggara	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali Nusra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2013

6	Penghargaan atas Keberhasilan Universitas Warmadewa sebagai Juara III Lomba <i>Quality Assurance</i> bagi PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII Bali Nusa Tenggara	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Bali Nusra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2014
---	--	---	------

Sumber: <http://www.warmadewa.ac.id/>

Selain itu Universitas warmadewa memiliki beragam unitas (unit kegiatan mahasiswa) masing masing unitas di kelompokkan menjadi beberapa tingkatan antara lain yaitu:

Tingkat Universitas:

1. Sentral Komunitas Mahasiswa Universitas Warmadewa (SEKOM-Unwar) yang didalamnya terbagi menjadi: Presidium (Legislatif) dan Sekjen (Eksekutif) dalam hal ini pereakilan mahasiswa di tuntut untuk dapat berpartisipasi di dalanya dan memperjuangkan aspirasi dari teman-teman mereka. Anggota dari sekom merupakan pilihan di masing masing fakultas yang berada di lingkungan Universitas Warmadewa yang mempunyai kredibilitas tinggi dan di anggap mampu menyuarakan aspirasi dari masing-masing fakultas.
2. Unitas Olahraga: dalam unitas ini di tujukan untuk mengembangkan bakat bakat mahasiswa dalam bidang olah raga. unitas Kempo berangotakan sekitar 50 mahasiswa , Pencak Silat beranggotakan sekitar 85 mahasiswa, Basket memiliki anggota cukup banyak yaitu kurang lebih ada sekitar 90 mahasiswa, Karatedo, Taekwondo, Volly, Boxer, Tenis Lapangan, dan Tenis Meja memiliki anggota yang tidak terlalu banyak karena bersivat

minoritas tapi dapat di rata-ratakan sekitar 25 mahasiswa di masing masing unitas tersebut. Sepak Bola yang sekarang cenderung di gantikan dengan futsal beranggotakan sekitar 30 mahasiswa dan unitas futsal ini telah beberapa kali mengadakan iven atau pertandingan yang mana pernah di selenggarakan dari fakultas maupun universitas. Unitas olah raga ini rutin setiap tahunnya di adakan pekan olahraga yang melombakan setiap cabang olah raga tersebut.

3. Unitas Khusus

Unitas khusus adalah unitas yang berkecenderungan memiliki kehususa dalam pelaksanaan atau iven-iven tertentu. Unitas khusus meliputi: Marching Band dalam marching band anggotanya diwajibkan memiliki bakat khusus karena bergerak di bidang seni. Unitas ini sering menorehkan prestasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus dan unitas ini berpartisipasi aktif di dalam ajang pesta kesenian bali (PKB) dalam acara pembukaan. Resimen Yon B.914 adalah unitas yang bergerak di bidang pengamanan baik dalam kampus maupun di luar kampus. Unitas ini memiliki hubungan dengan resimen-resimen yang berada di masing-masing kampus baik suasta maupun negri. Resimen mahasiswa Universitas Warmadewa kerap kali mengamankan iven-iven baik di dalam maupun di luar kampus. Resimen Universitas Warmadewa memiliki anggota kurang lebih 75 mahasiswa, Majalah Kampus “Singhadwala”, Lembaga Penerbitan *Warmadewa University Press* dibentuk dengan SK Rektor Nomor 349/Unwar/PD-02/2011. Latar belakang perlunya pendirian lembaga ini

berhubungan dengan semakin banyaknya dokumen akademik (Tri Darma) yang harus dipublikasikan dalam rangka mewujudkan *best practice* pengelolaan sistem penjaminan mutu akademik. Dokumen-dokumen tersebut seyogyanya diterbitkan oleh sebuah Lembaga Penerbitan Universitas. Lembaga ini dikembangkan untuk menangani kontrak penerbitan hasil karya penelitian, pengabdian masyarakat dan buku ajar dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Universitas Warmadewa. Sampai dengan saat ini sudah menerbitkan berbagai buku dan dokumen penjaminan mutu, dan yang baru diterbitkan buku "Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa", serta buku "Membangun Budaya Mutu di Perguruan Tinggi" bekerjasama dengan penerbit anggota IKAPI.

Sivitas akademika Universitas Warmadewa juga dapat mengekspresikan atau mempublikasikan kegiatan berdasarkan minat dan bakatnya atau menyusun karya tulis ilmiah pada bidang tertentu dalam Majalah Kampus Singhadwala, Koran Kampus Suara Warmadewa, Jurnal Ilmiah Wicaksana, Newsletter LPM, serta Jurnal Ilmiah lainnya yang ada di setiap fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa.

(<http://www.warmadewa.ac.id/index.php/fasilitas/11/Penerbitan>)

Mapala “Citta mandala”, adalah unitas yang bergerak dalam hal lingkungan atau pencinta alam. Mapala Universitas warmadewa memiliki anggota hampir mencapai 200 mahasiswa. Karena sangat di gemari oleh mahasiswa unitas mapala sering melakukan kegiatan sosial antara lain penanaman

pohon dan melakukan kebersihan di tempat umum dan di areal kampus sendiri.

4. Unitas Kegiatan Kesenian

Unitas ini bergerak di bidang kesenian yang cenderung di kaikan dalam upacara keagamaan dan lain sebagainya. Unitas ini memiliki unitas sebagai berikut antara lain: unitas Paduan Suara, unitas ini cenderung di gemari oleh mahasiswa yang beragama kristen baik katolik maupun protestan. Hal ini di sebabkan oleh mereka yang beragama kristen sering melakukan ibadah dengan menyanyikan nyanyian keagamaan di gereja. Unitas ini beranggotakan kurang lebih 75 mahasiswa. Unitas Seni tari, Gamelan, dan Tabuh cenderung di gemari oleh mahasiswa yang memeluk agama hindu. Ini di karenakan dalam hal upacara adat dan acara yang berhubungan dengan agama hindu cenderung berkaitan dengan unitas ini. Umitas ini memiliki wadah khusus yang tergabung dalam Pasemetonan Mahasiswa Hindu Darma Universitas Warmadewa (PMHD). Ini merupakan wadah khusus mahasiswa yang beragama hindu yang berada di lingkungan Universitas khususnya di Warmadewa. PMHD sendiri memiliki anggota kurang lebih 120 mahasiswa dan organisasi ini tergolong unitas paling aktif di Universitas Warmadewa.

Ditingkat Fakultas:Dewan Perwakilan Mashasiswa (DPMF)

Dewan perwakilan mahasiswa merupakan wadah legislatif di kampus. Ini di karenakan anggota dari DPM sendiri adalah mahasiswa yang berkompeten yang

mampu membawa aspirasi di setiap fakultas untuk di suarakan di tingkat Universitas khususnya di Warmadewa.

Ditingkat Jurusan:Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Melalui Organisasi Kemahasiswaan ini, mahasiswa akan menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas yang disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan didalam organisasi maupun dilingkungan sekitarnya oleh masing-masing organisasi baik berupa diskusi, seminar dan lain sebagainya. Anggota dari HMJ sendiri adalah seluruh mahasiswa yang bernaung di bawah jurusan tersebut.

BAB III

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

A. Deskripsi Sampel

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 6011 mahasiswa dan sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan metode Frank Lynnh yakni berjumlah 94 mahasiswa.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut identitas responden berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan tingkat semester.

Tabel 5
Daftar Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki – laki	54	57,44 %
2	Perempuan	40	42,56 %
	Total	94	100%

Sumber: Data identitas responden

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan identitas responden berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 atau 57,44% dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 40 atau 42, 56% dari total responden. Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 6
Daftar Responden Berdasarkan Jurusan

No	Jurusan	Jumlah	Presentase (%)
1	Ilmu Administrasi	3	3,20%
2	Ilmu Pemerintahan	1	1,06%
3	Sastra Inggris	8	8,51%
4	Budidaya Pertanian	2	2,13%
5	Peternakan	1	1,06%
6	Perikanan	1	1,06%
7	Ilmu Hukum	14	14,89%
8	Arsitektur	5	5,32%
9	Teknik Sipil	5	5,32%
10	Manajemen	20	21,28%
11	Akuntansi	24	25,53%
12	IESP	4	4,26%
13	Kedokteran	6	6,38%
	TOTAL	94	100%

Sumber: Data Identitas Responden

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan identitas responden berdasarkan jurusan. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah responden yang mengambil studi pada jurusan Ilmu Administrasi sebanyak 3 orang atau 3,20%, responden yang mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan sebanyak 1 orang atau 1.06%, responden yang mengambil jurusan Sastra Inggris sebanyak 8 orang atau 8,51%, responden yang mengambil jurusan Budidaya Pertanian sebanyak 2 orang atau 2,13%, responden yang mengambil jurusan Peternakan sebanyak 1 orang atau 1,06%, responden yang mengambil jurusan perikanan sebanyak 1 orang atau 1,06%, responden yang mengambil jurusan Ilmu Hukum sebanyak 14 orang atau 14,89%, responden yang mengambil jurusan Arsitektur sebanyak 5 orang atau 5,32%, responden yang mengambil jurusan Teknik Sipil 5 orang atau sebanyak 5,32%, responden yang mengambil jurusan Manajemen sebanyak 20 orang atau

21,28%, responden yang mengambil jurusan Akuntansi sebanyak 24 orang atau 25,53%, responden yang mengambil jurusan IESP sebanyak 4 orang atau 4,26%, responden yang mengambil jurusan Kedokteran sebanyak 6 orang atau 6,38%. Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Manajemen, dan Akuntansi.

Tabel 7
Daftar Tabel Responden Berdasarkan Semester

No	Semester	Jumlah	Presentase (%)
1	Semester II	22	23,41%
2	Semester IV	30	31,91%
3	Semester VI	23	24,47%
4	Semester VIII	19	20,21%
	Total	94	100%

Sumber: Data Identitas Responden

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan distribusi responden berdasarkan tingkat semesternya. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah responden yang duduk pada semester II berjumlah 22 orang atau 23,41%, jumlah responden yang duduk pada semester jumlah IV berjumlah 30 orang atau 31,91%, responden yang duduk pada semester VI berjumlah 23 orang atau 24,47%, jumlah responden yang duduk pada semester VIII berjumlah 19 orang atau 20,21%. Adanya perbedaan jumlah mahasiswa dari tingkatan paling rendah ke paling tinggi dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa pada masing-masing tingkat.

B. Analisis Variabel

Dari jawaban yang diberikan oleh 94 responden melalui daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah disebar, didapatkan skor atau nilai dan akan penulis sajikan dalam bentuk tabel. Untuk memperoleh jawaban yang serius dan benar-benar merepresentasikan persepsi dan sikap mahasiswa, penulis akan menjelaskan berdasarkan skor yang diperoleh, pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan tabulasi ganda untuk mencari jawaban rata-rata dari aspek persepsi dan tiga aspek sikap yang diteliti.

B.1 Analisis Persepsi

Tabel 8
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Bagaimana Pandangan
Saudara Terhadap Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		3	2	1		
1	58	27	9	94	174	54	9	237	2,52

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 8 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang bagaimana pandangan saudara terhadap dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sebanyak 58 responden menjawab setuju dan memperoleh skor 174, sebanyak 27 responden menjawab kurang setuju dan memperoleh skor 54, dan sebanyak 9 responden menjawab tidak setuju dengan skor 9. Dari hasil rata-rata diatas untuk pertanyaan nomor 1 adalah sebesar 2,52. Berdasarkan rata-rata skor ini, maka jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1 termasuk dalam kategori tinggi karena berada pada interval 2,34 – 3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa terhadap dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dari hasil analisis jawaban responden terlihat dengan jelas adanya perbedaan pandangan dari masing-masing responden setelah melalui proses pengindraan dan adanya perhatian mahasiswa tentang keberadaan terhadap masalah tersebut. Mahasiswa cenderung mempersepsikan bahwa desa dapat dilindungi dengan adanya Undang-undang tersebut. Maka dari itu mahasiswa cenderung menjawab setuju terhadap dibentuknya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian

besar mahasiswa memiliki pandangan yang positif atau setuju untuk dibentuknya undang – undang nomor 6 tahun 2014. Karena dari penuturan responden dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan desa dapat dilindungi keberadaannya.

Tabel 9
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Pandangan Mahasiswa Terhadap di Berlakukanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
2	23	33	38	94	23	66	114	203	2,16

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 9 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang pandangan mahasiswa terhadap di berlakukanya Undang-undang No 6 tahun 2014 di bali, sebanyak 23 responden menjawab tidak setuju dan mendapatkan skor 23, sebanyak 33 responden menjawab kurang sesuai dan mendapat skor 66 dan sebanyak 38 responden menjawab sesuai dan mendapat skor 114. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor yakni 2,16.berdasarkan rata rata tersebut maka jawaban responden untuk pertanyaan no 2 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33.Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa terhadap di berlakukanya Undang-undang no 6 tahun 2014 di Bali. Dari analisis jawaban responden terhadap masalah ini terdapat perbedaan atau variasi jawaban di antara mereka. Ini menunjukan bahawa pandangan mahasiswa bukan hanya

dari satu sisi saja, itu dikarenakan mahasiswa memiliki pemikiran yang kritis tentang permasalahan ini. Dalam permasalahan ini mahasiswa universitas Warmadewa cenderung menyatakan setuju untuk memberlakukan undang-undang ini di Bali dan mahasiswa tidak terlalu memahami terhadap berlakunya undang-undang ini di Bali ini dilihat dari rata-rata skor yang berada di antara interval sedang.

Tabel 10
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Bagaimana Tanggapan Mahasiswa Universitas Warmadewa Terhadap Adanya Dualisme Desa di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
3	36	36	22	94	108	72	22	202	2,15

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 10 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang bagaimana tanggapan mahasiswa universitas warmadewa terhadap adanya dualisme desa di Bali, sebanyak 36 responden menjawab sesuai dan mendapat skor 108, sebanyak 36 responden menjawab tidak sesuai dan mendapat skor 72 dan sebanyak 22 responden menjawab tidak sesuai dan mendapat skor 22. Dari perhitungan di atas maka didapatkan hasil rata-rata skor 2,15, berdasarkan rata-rata tersebut maka jawaban responden untuk pertanyaan no 3 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya dualisme desa di Bali. Dari analisis jawaban di atas dapat dilihat

bahawa mahasiswa Universitas Warmadewa tidak terlalu mengetahui terhadap adanya dualisme desa di Bali ini terlihat dari rata rata skor yang berada dalam kategori sedang. Tetapi tidak sedikit juga yang mengetahui eksistensi keberadaan dualisme itu, ini di buktikan dari jawaban mahasiswa yang menyatakan sesuai dengan keberadaan dualisme desa di Bali. Beberapa responden juga ada yang menjawab tidak sesuai, ini juga di mungkinkan karena pemahaman atau pengetahuan mahasiswa tersebut kurang dalam hal ini, sedangkan dualisme desa di bali telah di buktikan eksistensinya karena telah berjalan dari jaman penjajahan Belanda. Dalam hal ini ada pula beberapa responden yang menjawab kurang sesuai, ini menunjukan pandangan mahasiswa sangat bervariasi tergantung dari mana mahasiswa memahami objek tersebut. Dari hasil observasi juga dapat dilihat bahwa tidak semua mahasiswa mengetahui tentang keberadaan dualisme desa. Ini terlihat jelas dari kekurangan pemahaman mahasiswa terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner. Disamping itu banyak juga mahasiswa yang bertanya kepada peneliti mengenai dualisme desa. Itu juga membuktikan, kebanyakan mahasiswa kurang memahami tentang permasalahan tersebut. Ini berbanding lurus dengan hasil kuisioner yang berada pada kisaran interval sedang.

Tabel 11
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Pandangan Mahasiswa Terhadap Adanya Dualisme Desa Setelah di Berlakukanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
4	15	44	35	94	15	88	105	208	2,21

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 11 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang pandangan mahasiswa terhadap adanya dualisme desa setelah di berlakukannya Undang-undang no 6 tahun 2014. Sebanyak 15 responden menjawab tidak setuju dan mendapatkan skor 15, sebanyak 44 responden menjawab kurang setuju dan mendapat skor 88 dan sebanyak 35 menjawab setuju dan mendapat skor 105. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata 2,21 , dari rata rata tersebut maka jawaban reponden terhadap pertanyaan no 4 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33.Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa universitas warmadewa terhadap adanya dualisme desa setelah di berlakukannya Undang-undang no 6 tahun 2014. Dari analisis di atas dapat di lihat tingkat kepekaan mahasiswa dalam masalah ini sangat tinggi, ini dapat di lihat dari selisih jawaban mahasiswa yang tidak terpaut jauh dari jawaban satu dengan yang lain. Bila di lihat dari jawaban setuju maka mahasiswa cenderung berpandangan undang-undang ini sangan penting penerapanya di Bali untuk mempertegas pengaturan terhadap adanya dualisme desa tersebut dan jika di lihat dari beberapa mahasiswa yang menjawab kurang setuju ini menunjukan bahwa pandangan mahasiswa ingin tetap menjaga eksistensi keberadaan dualisme desa yang selama ini di terapkan di Bali. Tetapi mahasiswa kurang begitu paham dengan tujuan di berlakukan undang-undang no 6 tahun 2014 ini, itu dapat di lihat dari hasil rata rata skor yang menunjukan kategori sedang. Dari hasil observasi peneliti dapat

melihat bahwa kecenderungan responden menginginkan mempertahankan eksistensi kedua desa tersebut karena dari pengamatan peneliti, responden terlihat kurang antusias dengan permasalahan diatas. Ini didukung oleh rata-rata skor yang berada pada kategori sedang.

Tabel 12
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Pandangan Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Yang mengharuskan Untuk Memilih, Mengabungkan dan Menghapuskan Salah Satu Desa Yang Ada di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
5	29	34	31	94	87	68	31	186	1,98

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 12 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang pandangan mahasiswa terhadap Undang-undang no 6 tahun 2014 yang mengharuskan untuk memilih, mengabungkan dan menghapuskan salah satu desa yang ada di Bali. Sebanyak 29 reaponden menjawab setuju dan memperoleh skor 87, sebanyak 34 responden menjawab kurang setuju dan memperoleh skor 68 , sebanyak 31 responden menjawab tidak setuju dan mendapat skor 31. Dari hasil perhitungan skor di atas mendapatkan rata rata skor yakni 1,98. Dari rata rata skor di atas maka jawaban mahasiswa untuk pertanyaan no 5 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-1,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa universitas warmadewa terhadap Undang-undang no 6 tahun 2014 yang mengharuskan untuk

memilih, menggabungkan dan menghapuskan salah satu desa yang ada di Bali. Dari analisis di atas dapat digambarkan bahwa mahasiswa tidak begitu memahami tentang tujuan permasalahan tersebut ini dilihat dari rata-rata skor yang berada dalam kategori sedang. Dilihat dari jumlah jawaban responden yang memilih, di sini mahasiswa cenderung memilih kurang setuju dan tidak setuju, ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih ingin mempertahankan eksistensi keberadaan dua desa yang telah berjalan dan melakukan tugas sesuai wewenang masing-masing. Beberapa ada yang menjawab setuju ini dikarenakan mahasiswa memandang perlu mengaktifkan kinerja desa tersebut dengan satu nama dan satu pimpinan desa.

Tabel 13
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Apakah Adanya Dualisme Desa di Bali Mahasiswa Pernah Mendengar Terjadinya Konflik Antara Desa Pakraman dan Desa Dinas

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
6	28	38	28	94	28	76	84	188	2,00

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 13 di atas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang apakah adanya dualisme desa di Bali mahasiswa pernah mendengar terjadinya konflik antara desa pakraman dan desa dinas. Sebanyak 28 responden menjawab tidak pernah dan mendapat skor 28, sebanyak 38 responden menjawab kadang-kadang dan mendapat skor 76, dan sebanyak 28 responden menjawab ya pernah dan mendapat skor 84. Dari hasil perhitungan skor di atas maka didapatkan rata-rata skor 2,00 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 6

termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenaiapakan adanya dualisme desa di bali mahasiswa pernah mendengar terjadinya konflik antara desa pakraman dan desa dinas. Dari analisis di atas bahwa sebagian besar mahasiswa universitas Warmadewa pernah mendengar terjadinya konflik antara desa pakraman dan desa dinas. Dari jumlah skor masing masing pertanyaan terlihat bahwa itensitas terjadinya konflik antara desa pakraman dan desa dinas di bali sering terjadi tetapi Jawaban mahasiswa yang bervariasi menunjukan tidak semua desa pakraman dan desa dinas di bali sering bersitegang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya masing masing. Dari hasil observasi di lapangan juga menunjukan bahwa desa pakraman dan desa dinas tidak pernah bersitegang dalam hal apapun. Ini dapat peneliti lihat dari sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa hubungan antara kedua desa tersebut sangat harmonis. Tidak ada yang di bawah dan diatas tetapi berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Tabel 14
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Tanggapan Mahasiswa Universitas Warmadewa Jika Terjadi Konflik Antara Desa Pakraman dan Desa Dinas

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
7	14	24	56	94	42	48	56	146	1,55

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 14 diatas dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Warmadewa jika terjadi konflik antara desa pakraman dan desa dinas. Sebanyak 14 responden menjawab setuju dengan skor 42, sebanyak 24 responden menjawab kurang setuju dengan skor 48 dan sebanyak 56 responden menjawab tidak setuju dengan skor 56. Dari perhitungan diatas, maka didapatkan rata-rata skor 1,55 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan nomor 7 termasuk dalam kategori rendah karena berada diantara interval 1,00 – 1,66. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggapan mahasiswa jika terjadi konflik antara desa pakraman dan desa dinas. Dari analisis data diatas dapat dilihat sebagian besar mahasiswa Universitas Warmadewa menjawab tidak setuju dengan terjadinya konflik. Ini membuktikan bahwa mahasiswa ingin ikut serta dalam menjaga keharmonisan antara desa pakraman dan desa dinas, sedangkan jika dilihat dari rata-rata skor yang berada dikisaran rendah, ini menggambarkan bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa kurang mengetahui jenis konflik yang terjadi diantara dua desa tersebut.

Tabel 15
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Pandangan Mahasiswa Apakah Fungsi Desa Pakraman Sudah Berjalan Dengan Baik

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
8	9	42	43	94	9	84	129	222	2,36

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 15 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang bagaimana pandangan mahasiswa apakah fungsi desa pakraman sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 9 responden menjawab tidak pernah dengan skor 9, sebanyak 42 responden menjawab kadang-kadang dengan skor 84, dan sebanyak 43 responden menjawab iya, sudah berjalan dengan baik dengan skor 129. Dari perhitungan data diatas didapatkan rata-rata skor 2,36 dan dari jawaban pertanyaan nomor 8 termasuk dalam kategori tinggi karena berada diantara interval 2,34 - 3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan mahasiswa apakah fungsi desa pakraman sudah berjalan dengan baik. Dari analisis data diatas dapat dilihat bahwa mahasiswa Warmadewa berpandangan bahwa fungsi desa pakraman sudah berjalan dengan baik. tetapi dengan adanya variasi jawaban mahasiswa menunjukan bahwa tidak semua desa pakraman telah melakukan fungsinya dengan baik. jika di lihat dari rata rata skor yang berada dalam kategori tinggi, ini menunjukan bahawa mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi fungsi dari desa pakraman itu sendiri. Dari hasil observasi di lapangan mahasiswa memberikan tanggapan positif bahwa memang benar fungsi desa pekraman sebagai wadah adat istiadat di Bali sudah berjalan dengan baik, ini di dasari ajaran tri hita karana yang tlah mendarah daging pada tubuh desa pakraman yang berkaitan dengan norma-norma setempat.

Tabel 16
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Pandangan Mahasiswa Apakah Fungsi Desa Dinas Sudah Berjalan Dengan Baik

No	Frekuensi Jawaban	Total	Skor Jawaban	Total	Rata-
----	-------------------	-------	--------------	-------	-------

	A	B	C	Resp	3	2	1	Skor	rata
9	38	45	11	94	114	90	11	215	2,29

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 16 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang bagaimana pandangan mahasiswa apakah fungsi desa dinas sudah berjalan dengan baik. Sebanyak 38 responden menjawab ya sudah berjalan dengan baik dengan skor 144, sebanyak 45 responden menjawab kadang-kadang dengan skor 90 dan 11 responden menjawab tidak pernah dengan skor 11. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 2,29 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 9 termasuk dalam kategori tinggi karena berada dalam kisaran interval 2,34-3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan mahasiswa apakah fungsi desa dinas sudah berjalan dengan baik. dari analisis data di atas dapat di gambarkan bahwa mahasiswa universitas warmadewa memiliki pemahaman yang jelas tentang fungsi-fungsi desa dinas tersebut. Ini dapat dilihat dari hasil jawaban mahasiswa yang berada dalam kategori tinggi. Di samping itu mahasiswa sudah terbiasa dan paham tentang tugas kedinasan karena mereka sering mengurus ktp dan surat-surat yang berhubungan dengan desa dinas. Dari jawaban mahasiswa universitas warmadewa dapat di ketahui bahwa sebagian besar desa dinas sudah melakukan tugasnya dengan baik dan ada pula beberapa mahasiswa yang menjawab kadang –kadang, ini menunjukan bahwa masih ada beberapa desa dinas yang belum melakukan fungsinya dengan baik. Dari hasil observasi dilapangan peneliti dapat menangkap bahwa mahasiswa memiliki

pandangan yang baik tentang adanya desa dinas. Ini di karenakan masyarakat khususnya mahasiswa sudah merasakan kemudahan- kemudahan dalam hal mengurus surat yang berkaitan dengan kependudukan karena dalam hal ini desa dinas memang memiliki fungsi untuk melayani masyarakat di bidang pencatatan kependudukan.

Tabel 17
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Tanggapan Mahasiswa Terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Masing Masing Desa Apakah Sudah Berjalan Sesuai Tupoksi Masing Masing

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
10	14	45	35	94	14	90	105	209	2,22

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 17 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang masing masing desa apakah sudah berjalan sesuai tupoksi masing masing. Sebanyak 14 responden menjawab tidak pernah, dengan skor 14, sebanyak 45 responden menjawab kadang kadang dengan skor 90 dan sebanyak 35 responden menjawab ya sudah sesuai dengan skor 105. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 2,22 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 10 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang masing masing desa apakah sudah sesuai dengan tupoksi masing-

masing. Dari analisis data di atas dapat dilihat variasi jawaban responden dan ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan tupoksi masing masing desa. Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang permasalahan ini juga dapat dilihat dari kategori jawaban mahasiswa yang berada dalam kategori sedang. Tetapi sebagian besar mahasiswa warmadewa memberi tanggapan bahwa desa-desa tersebut sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya masing masing.

B.2 Analisis Sikap

B.2.1 Aspek Kognitif

Tabel 18
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Keberadaan Undang Undang Desa Yang Terbaru

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
1	30	43	21	94	90	86	21	197	2,09

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 18 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang keberadaan undang undang desa yang terbaru. Sebanyak 30 responden menjawab tahu dengan skor 90, sebanyak 43 responden menjawab kurang tahu dengan skor 86 dan sebanyak 21 responden menjawab tidak tahu dan mendapat skor 21. Dari hasil perhitungan skor di atas maka didapatkan rata rata skor 2,09 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 1 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas

mengenai pengetahuan mahasiswa terhadap keberadaan undang-undang desa terbaru. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa kurang tahu tentang keberadaan tentang undang-undang desa tersebut, ini dilihat dari rata rata skor yang menunjukkan kategori sedang.

Tabel 19
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Sosialisasi Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
2	59	20	15	94	59	40	45	144	1,53

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 19 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang sosialisasi penerapan Undang-undang No 6 tahun 2014. Sebanyak 59 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi dengan skor 59, sebanyak 20 responden menjawab kadang-kadang dengan skor 40 dan 15 responden menjawab pernah mengikuti sosialisasi dengan skor 45. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 1,53 dan dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 2 termasuk dalam kategori rendah karena berada dalam kisaran interval 1,00-1,66. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sosialisasi penerapan Undang-undang No 6 tahun 2014, dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa universitas warmadewa tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang masalah tersebut. Dari hasil rata rata skor tentang masalah di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa mahasiswa universitas Warmadewa

cenderung tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang Undang-undang no 6 tahun 2014, ini di lihat dari rata-rata skor yang menunjukkan kategori rendah.

Tabel 20
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Apakah Mahasiswa Pernah Melihat, Mendengarkan Penyuluhan atau Sosialisasi Undang-Undang Desa

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
3	27	30	37	94	81	60	37	178	1,89

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 20 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang apakah mahasiswa pernah melihat,mendengarkan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang desa. Sebanyak 27 responden menjawab pernah melihat dengan skor 81, sebanyak 30 responden menjawab kadang-kadang dengan skor 60 dan 37 responden menjawab tidak pernah melihat dengan skor 37.Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 1,89dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 3 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33.Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenaiapakah mahasiswa pernah melihat,mendengarkan penyuluhan atau sosialisasi Undang-undang desa. Dari analisis data di atas dapat dilihat bahwa sebagian mahasiswa tidak pernah melihat mendengarkan tentang penyuluhan atau sosialisasi tentang Undang-undang desa.

Tabel 21
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Pengetahuan Pokok-Pokok Pikiran atau Ulasan yang di Atur Dalam Undang-Undang Tersebut

No	Frekuensi Jawaban	Total	Skor Jawaban	Total	Rata-
----	-------------------	-------	--------------	-------	-------

	A	B	C	Resp	1	2	3	Skor	rata
4	32	51	11	94	32	102	33	167	1,78

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 21 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang pengetahuan pokok-pokok pikiran atau ulasan yang di atur dalam Undang-undang tersebut. Sebanyak 32 responden menjawab tidak tahu dengan skor 32, sebanyak 51 responden menjawab kurang tahu dengan skor 102 dan 11 responden menjawab tahu dengan skor 33. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 1,78 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 4 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengetahuan mahasiswa tentang pokok-pokok pikiran atau ulasan yang di atur dalam Undang-undang tersebut. Dari analisis data di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa cenderung kurang mengetahui tentang pokok-pokok pikiran atau ulasan yang di atur dalam Undang-undang tersebut. Dilihat dari rata-rata skor dapat di tarik kesimpulan bahwa mahasiswa kurang memahami tentang apa isi pokok dan ulasan yang di atur dalam Undang-undang tersebut, ini di tunjukan oleh rata-rata skor yang berada dalam kategori sedang.

Tabel 22
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang darimana Mahasiswa Pernah Mendengar Undang-Undang Tersebut.

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
5	54	15	25	94	162	30	25	217	2,31

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 22 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang dari mana mahasiswa pernah mendengar Undang-undang tersebut. Sebanyak 54 responden menjawab lingkungan kampus dengan skor 162, sebanyak 15 responden menjawab lingkungan keluarga dengan skor 30 dan sebanyak 25 menjawab lingkungan pergaulan dengan skor 25. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 2,31 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 5 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai dari mana mahasiswa pernah mendengar Undang-undang tersebut. Dari analisis data di atas dapat di lihat sebagian besar responden mendapatkan informasi tentang undang-undang tersebut melalui lingkungan kampus, baik itu tentang penyuluhan atau sosialisasi maupun isi dari Undang-undang tersebut. Sedangkan beberapa responden mendapatkan informasi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan.

Tabel 23

Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Pertanyaan Apakah Saudara Mengikuti Perkembangan dan Perjalanan Undang-Undang Tentang Desa tersebut

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
6	36	49	9	94	36	98	27	161	1,71

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 23 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang pertanyaan apakah saudara mengikuti perkembangan dan perjalanan

Undang-undang tentang desa tersebut. Sebanyak 36 responden menjawab tidak tahu dengan skor 36, sebanyak 49 responden menjawab kadang-kadang dengan skor 98 dan sebanyak 9 responden menjawab sering dengan skor 27. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 1,71 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 6 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut di atas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan perjalanan Undang-undang tentang desa tersebut. Dari hasil di atas dapat di gambarkan bahwa mahasiswa kurang tertarik untuk mengikuti perkembangan dan perjalanan masalah tersebut, ini dapat di lihat dari sebagian besar responden menjawab kadang-kadang. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa kurang antusias karena permasalahan ini belum menimbulkan efek yang berarti bagi kaum masyarakat luas.

Tabel 24
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Pertanyaan Apakah Mahasiswa Mengetahui Tentang Adanya Dualisme Desa di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
7	40	40	14	94	120	80	14	214	2,28

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 24 di atas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang pertanyaan apakah mahasiswa mengetahui tentang adanya dualisme desa di Bali. Sebanyak 40 responden menjawab mengetahui dengan skor 120, sebanyak 40 responden menjawab kurang tahu dengan skor 80 dan sebanyak 14 responden

menjawab tidak tahu dengan skor 14. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 2,28 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 7 termasuk dalam kategori tinggi karena berada dalam kisaran interval 2,34-3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertanyaan apakah mahasiswa mengetahui tentang adanya dualisme desa di Bali. Dari analisis diatas menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang adanya dualisme desa di Bali berada dalam kategori tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui tentang adanya dualisme desa di Bali. Di lihat dari frekuensi jawaban hanya sebagian kecil mahasiswa yang tidak mengetahui tentang keberadaan dualisme desa yang ada di Bali.

Tabel 25
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Apakah Bali Masih Memerlukan Dua Sistem Pemerintahan Desa

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
8	24	28	42	94	24	56	126	206	2,19

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 25 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang apakah Bali masih memerlukan dua sistem pemerintahan desa. Sebanyak 24 responden menjawab tidak perlu dengan skor 24, sebanyak 28 responden menjawab kurang perlu dengan skor 56 dan 42 responden menjawab perlu dengan skor 126. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 2,19 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 8 termasuk dalam kategori sedang

karena berada dalam kisaran interval 1,67- 2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai apakah Bali masih memerlukan dua sistem pemerintahan desa. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa respon mahasiswa masih sangat mendukung di jalankannya sistem dua desa tersebut. Di lihat dari selisih frekuensi jawaban mahasiswa terlihat perbedaan yang tidak signifikan ini dikarenakan tingkat kritis berfikir mahasiswa tergolong tinggi.

Tabel 26
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Pemaksaan Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Di Bali Tanpa Mempertimbangan Kearifan Lokal Setempat yang Senantiasa Berbeda

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
9	28	32	34	94	84	64	34	182	1,94

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 26 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang pemaksaan penerapan Undang-undang no 6 tahun 2014 di Bali tanpa mempertimbangan kearifan lokal setempat yang senantiasa berbeda. Sebanyak 28 responden menjawab sesuai dengan skor 84, sebanyak 32 responden menjawab kurang sesuai dengan skor 64, dan sebanyak 34 responden menjawab tidak sesuai dengan skor 34. Dari hasil perhitungan skor di atas maka di dapatkan rata rata skor 1,94 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 9 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67- 2,33. Hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemaksaan penerapan Undang-undang no 6 tahun 2014 di Bali tanpa

mempertimbangan kearifan loka setempat yang senantiasa berbeda. Dari analisis data di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa cenderung memberikan penilaian setuju dengan masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan kejelasan tentang Undang-undang tersebut sampai sejauh mana desa tersebut diatur. Sedangkan dilihat dari rata-rata skor pemahaman mahasiswa tentang permasalahan ini cukup kurang karena berada dalam kisaran kategori sedang.

Tabel 27
Frekuensi dan Skor Dari 94 Responden Tentang Pertanyaan Apakah Dengan Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dapat Mengefektifkan Kerja dan Fungsi dari Desa Tersebut

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
10	31	34	29	94	31	68	87	186	1,98

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 27 diatas dapat dijelaskan frekuensi dan skor dari 94 responden tentang pertanyaan apakah dengan berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dapat mengefektifkan kerja dan fungsi dari desa tersebut. Sebanyak 31 responden menjawab tidak efektif dengan skor 31, sebanyak 34 responden menjawab kurang efektif dengan skor 68 dan sebanyak 29 responden menjawab efektif dengan skor 87. Dari hasil perhitungan skor di atas maka didapatkan rata rata skor 1,98 dari jawaban mahasiswa tentang pertanyaan no 10 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam kisaran interval 1,67- 2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai apakah dengan berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dapat mengefektifkan kerja dan fungsi dari desa tersebut. Dianalisis

dari tabel diatas terlihat jelas bahwa mahasiswa cenderung memberikan skor tinggi pada jawaban efektif. Ini dikarenakan dengan adanya pengabungan tugas dan fungsi dapat menjadikan pelayanan yang terpadu dari satu pintu, baik urusan adat istiadat maupun kedinasan. Dilihat dari rata-rata skor yang berada dalam kategori sedang ini menunjukkan mahasiswa kurang begitu paham dengan masalah di atas.

B.2.2 Aspek Afektif

Tabel 28
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Perasaan Jika Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Resmi di Berlakukan Di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
1	35	40	19	94	105	80	19	204	2,17

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 28 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang perasaan jika Undang-undang no 6 tahun 2014 resmi di berlakukan di Bali. Sebanyak 35 responden menjawab mendukung dengan skor 105, sebanyak 40 responden menjawab kurang mendukung dengan skor 80, dan sebanyak 19 responden menjawab tidak mendukung dengan skor 19. Dari perhitungan hasil rata-rata diatas untuk pertanyaan nomor 1 adalah sebesar 2,17. Berdasarkan rata-rata skor ini, maka jawaban responden untuk pertanyaan nomor 1 termasuk dalam kategori sedang karena berada pada interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perasaan mahasiswa jika Undang-undang no 6 tahun 2014 resmi di berlakukan di Bali. Dari analisis data di atas dapat di gambarkan bahwa

mahasiswa mendukung jika Undang-undang ini resmi di terapkan di bali. Sedangkan jika di tinjau dari rata-rata skor yang berada pada kategori sedang ini menunjukkan perasaan mahasiswa biasa biasa sajan dengan akan di terapkanya Undang-undang tersebut di bali. Dengan melihat dari frekuensi jawaban mahasiswa yang selisihnya tidak terlalu jauh menunjukan bahwa mahasiswa memiliki kepekaan yang tinggi terhadap suatu permasalahan.

Tabel 29
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa Jika di Anjurkan Untuk Memilih Salah Satu di Antara Dua Pemerintahan Desa Tersebut

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
2	34	40	20	94	34	80	60	174	1,85

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 29 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang perasaan mahasiswa jika di anjurkan untuk memilih salah satu di antara dua pemerintahan desa tersebut. Sebanyak 34 responden menjawab tidak mendukung dan memilih dengan skor 34, sebanyak 40 responden menjawab kurang mendukung dan ragu-ragu dengan skor 80 dan sebanyak 20 responden menjawab mendukung dan memilih dengan skor 60. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,85. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 2 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana perasaan mahasiswa jika dianjurkan untuk memilih salah satu di antara dua pemerintahan desa. Dari perolehan skor di atas terlihat jelas bahwa mahasiswa mendukung dan akan memilih jika memang

di anjurkan untuk memilih diantara dua desa tersebut. Jika di lihat dari frekuensi jawaban mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung tidak mendukung dan tidak memilih. Perbedaan ini menunjukkan bahwamahasiswa kurang begitu memahami tentang permasalahan diatas ini di buktikan dari rata-rata skor yang berada di kisaran sedang.

Tabel 30
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Bagaimana Perasaan Mahasiswa Jika Diharuskan Memilih Desa Dinas Untuk Di Pertahankan dan Desa Pakraman di Lebur

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
3	18	41	35	94	54	82	35	171	1,82

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 30 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang bagaimana perasaan mahasiswa jika diharuskan memilih desa dinas untuk di pertahankan dan desa pakraman di lebur.sebanyak 18 responden menjawab mendukung dengan skor 54 , sebanyak 41 responden menjawab kurang mendukung dengan skor 82 dan sebanyak 35 responden menjawab tidak mendukung dengan skor 35. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,82. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 3 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana perasaanmahasiswa jika diharuskan memilih desa dinas untuk di pertahankan dan desa pakraman di lebur. Dari analisis di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memberi jawaban kurang

mendukung. Sedangkan dilihat dari skor jawaban mahasiswa cenderung memberikan skor tinggi pada jawaban kurang mendukung. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih ragu-ragu untuk memilih salah satu desa tersebut apalagi sampai melebur salah satunya.

Tabel 31
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Bagaimana Perasaan Mahasiswa Jika Diharuskan Memilih Desa Pakraman Untuk Dipertahankan dan Desa Dinas Dilebur

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
4	28	45	21	94	28	90	63	181	1,93

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 31 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang bagaimana perasaan mahasiswa jika diharuskan memilih desa pakraman untuk dipertahankan dan desa dinas dilebur. Sebanyak 28 responden menjawab tidak mendukung dengan skor 28, sebanyak 45 responden menjawab kurang mendukung dengan skor 90, dan sebanyak 21 responden menjawab mendukung dengan skor 63. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,93. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 4 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana perasaan mahasiswa jika diharuskan memilih desa pakraman untuk dipertahankan dan desa dinas dilebur. Dari analisis diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sebagian besar mahasiswa kurang mendukung untuk diharuskan memilih desa pakraman dan melebur desa dinas. ini dilihat dari pemberian skor

tertinggi pada opsi tersebut. Ini menunjukkan kecenderungan mahasiswa masih ragu-ragu atau kurang mendukung dengan adanya opsi untuk memilih salah satu diantara dua desa tersebut.

Tabel 32
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Diadakannya Sosialisasi
Mengenai Undang-Undang Desa Dilakukan Lebih Gencar dan Sering

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		3	2	1		
5	44	34	16	94	132	68	16	216	2,30

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 32 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang diadakannya sosialisasi mengenai Undang-Undang desa dilakukan lebih gencar dan sering. Sebanyak 44 responden menjawab senang dengan skor 132. Sebanyak 34 responden menjawab kurang senang dengan skor 68, dan sebanyak 16 responden menjawab tidak senang dengan skor 16. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,30. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 5 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai diadakannya sosialisasi Undang-undang Desa dilakukan lebih gencar dan sering. Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa mahasiswa menginginkan kejelasan mengenai Undang-undang tersebut. Ini ditunjukkan dengan antusias mahasiswa yang cenderung menjawab senang jika sosialisasi tentang hal tersebut lebih gencar dan lebih sering dilaksanakan.

Tabel 33
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa
Jika Dua Fungsi Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas di Bali Digabung
Menjadi Satu Fungsi

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		1	2	3		
6	31	27	36	94	31	54	108	193	2,05

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 33 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang perasaan mahasiswa jika dua fungsi pemerintahan desa pakraman dan desa dinas di Bali digabung menjadi satu fungsi. Sebanyak 31 responden menjawab tidak senang dengan skor 31, sebanyak 27 responden menjawab kurang senang dengan skor 54, dan sebanyak 36 responden menjawab senang dengan skor 108. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,05. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 6 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perasaan mahasiswa jika dua fungsi pemerintahan desa pakraman dan desa dinas di Bali. Dari hasil olah data diatas dapat digambarkan dengan jelas bahwa mahasiswa merasa senang jika dua fungsi pemerintahan desa ini digabungkan. Dari jawaban diatas dapat diterka bahwa mahasiswa menginginkan pemerintahan desa yang efisien, guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat, baik dibidang adat maupun kedinasan. Dilihat dari frekuensi jawaban responden tidak sedikit pula yang memberikan jawaban kurang senang dan tidak senang, ini menunjukkan

beberapa mahasiswa ingin menjaga eksistensi keberadaan dua desa tersebut tanpa menghilangkan salah satu diantaranya.

Tabel 34
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa
Jika Bali Mendapatkan Hak Kekhususan Untuk Dapat Tetap Menjalankan
Dualisme Pemerintahan Desa di Bali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		3	2	1		
7	42	36	16	94	126	72	16	214	2,28

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 34 diatas dijelaskan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang perasaan mahasiswa jika Bali mendapatkan hak kekhususan untuk dapat tetap menjalankan dualisme pemerintahan desa di Bali. Sebanyak 42 responden menjawab senang dengan skor 126, sebanyak 36 responden menjawab kurang senang dengan skor 72, dan sebanyak 16 responden menjawab tidak senang dengan skor 16. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,28. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 7 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perasaan mahasiswa jika bali mendapatkan hak kekhususan untuk dapat tetap menjalankan dualisme pemerintahan desa di Bali. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat antusias mahasiswa Universitas Warmadewa untuk mendukung Bali mendapat hak kekhususan guna tetap menjalankan dua sistem pemerintahan desa tersebut. Karena Bali memiliki kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat istiadat

serta ajaran agama di masing-masing desa, baik itu desa pakraman maupun desa dinas.

Tabel 35

Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa Jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dipaksakan Penerapannya di Bali Tanpa Mempertimbangkan Kearifan Lokal Setempat yang Senantiasa Berbeda

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
8	54	33	7	94	54	66	21	141	1,50

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 35 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang perasaan mahasiswa jika Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dipaksakan penerapannya di Bali tanpa mempertimbangkan kearifan lokal setempat yang senantiasa berbeda. Sebanyak 54 responden menjawab tidak senang dengan skor 54, sebanyak 33 responden menjawab kurang senang dengan skor 66, sebanyak 7 responden menjawab senang dengan skor 21. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,50. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 8 termasuk dalam kategori rendah karena berada dalam interval 1,00-1,66. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perasaan mahasiswa jika Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dipaksakan penerapannya di Bali tanpa mempertimbangkan kearifan lokal setempat yang senantiasa berbeda. Dari olah tabel diatas terlihat jelas bahwa perasaan mahasiswa Universitas Warmadewa cenderung tidak senang jika undang-undang tentang desa dipaksakan penerapannya. Ini akan menjadi hambatan untuk menjalankan adat istiadat desa

tersebut. Selain itu, undang-undang desa tersebut jika dipaksakan penerapannya akan menyusahkan masyarakat untuk beradaptasi di dalamnya. Ini pula akan memicu masalah-masalah baru yang berhubungan dengan wewenang dan tugas di desa adat dan desa dinas.

Tabel 36
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa Dengan Adanya Sistem Dualisme Desa Yang Berlaku di Bali Sekarang Ini

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
9	41	35	18	94	123	70	18	211	2,24

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 36 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang perasaan mahasiswa dengan adanya sistem dualisme desa yang berlaku di Bali sekarang ini. Sebanyak 41 responden menjawab senang dengan skor 123, sebanyak 35 responden menjawab kurang senang dengan skor 70, dan sebanyak 18 responden menjawab tidak senang dengan skor 18. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,24. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 9 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perasaan mahasiswa dengan adanya dualisme desa yang berlaku di bali sekarang ini. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat gambaran yang jelas bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa cenderung merasa senang dengan adanya sistem dualisme desa yang berlaku di Bali sekarang ini. Ini menggambarkan bahwa mahasiswa masih tetap ingin menjaga eksistensi

dari keberadaan desa pakraman yang mengatur tentang adat istiadat setempat serta desa dinas yang mengurus segala administrasi kependudukan yang dalam suatu desa. Walaupun tugas dan wewenang yang berbeda, tetapi dua desa tersebut tetap bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya tanpa terjadi konflik yang berarti.

Tabel 37
Frekuensi dan Skor Jawaban 94 Responden Tentang Perasaan Mahasiswa Jika Dualisme Desa di Bali Tetap Dipertahankan Seperti Yang Telah Berjalan

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
10	18	35	41	94	18	70	123	211	2,24

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 37 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban 94 responden tentang perasaan mahasiswa jika dualisme desa di bali tetap dipertahankan seperti yang telah berjalan. Sebanyak 18 responden menjawab tidak senang dengan skor 18, sebanyak 35 responden menjawab kurang senang dengan 70, dan sebanyak 41 menjawab dengan skor 123. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,24. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 10 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perasaan mahasiswa jika dualisme desa di Bali tetap dipertahankan seperti yang telah berjalan. Dari hasil olah data diatas dapat diterangkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Warmadewa merasa senang jika dualisme desa di bali tetpa dipertahankan seperti yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa ingin menjaga keharmonisan hubungan

antara kedua pemerintahan desa tersebut. Inipula yang mendasari bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa ingin melestarikan keunikan Bali yang menjalankan dua fungsi desa secara bersama-sama.

B. Aspek Evaluasi

Tabel 38
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Pertanyaan Apakah Mahasiswa Siap Dengan Opsi Memilih Satu Diantara Dua Desa Tersebut

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
1	37	37	20	94	111	74	20	205	2,18

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 38 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang pertanyaan apakah mahasiswa siap dengan opsi memilih satu diantara dua desa tersebut. Sebanyak 37 responden menjawab siap dengan skor 111, sebanyak 37 responden menjawab kurang siap, dan sebanyak 20 responden menjawab tidak siap dengan skor 20. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,18. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 1 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertanyaan apakah mahasiswa siap dengan opsi memilih satu diantara dua desa tersebut. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat gambaran yang jelas bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa tidak siap untuk memilih salah satu diantara dua desa tersebut. Ini membuktikan gambaran yang jelas bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa ingin menjaga keberadaan dua desa tersebut

untuk dipertahankan dan dilestarikan karena ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Bali.

Tabel 39
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Tanggapan Mahasiswa Mengenai Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
2	21	47	26	94	21	94	78	193	2,05

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 39 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang tanggapan mahasiswa mengenai berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sebanyak 21 responden menjawab tidak setuju dengan skor 21, sebanyak 47 responden menjawab kurang setuju dengan skor 94, dan sebanyak 26 responden menjawab setuju dengan skor 78. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,05. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 2 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanggapan mahasiswa mengenai berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat kecenderungan mahasiswa memilih opsi kurang setuju mengenai pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Ini menunjukkan keraguan mahasiswa tentang keberadaan undang-undang tersebut masih menimbulkan polemik terkait penerapannya khususnya di Bali. Sebagian kecil berkecenderungan mahasiswa memilih tidak setuju dan setuju yang menunjukkan

bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini menuai respon yang beragam, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Tabel 40
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Menurut Mahasiswa Apakah Dualisme Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas Sudah Berjalan Baik Sampai Saat Ini

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
3	47	32	15	94	141	64	15	220	2,34

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 40 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang bagaimana menurut mahasiswa apakah dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas sudah berjalan baik sampai saat ini. Sebanyak 47 responden menjawab baik dengan skor 141, sebanyak 32 responden menjawab kurang baik dengan skor 64, dan sebanyak 15 responden menjawab tidak baik dengan skor 15. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,34. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 3 termasuk dalam kategori tinggi karena berada dalam interval 2,34 – 3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana menurut mahasiswa apakah dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas sudah berjalan dengan baik. Hasil olah data diatas menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih tentang permasalahan diatas. Ini ditunjukkan dari jumlah rata-rata skor yang berada pada kategori tinggi. Dilihat dari hasil skor yang diberikan mahasiswa kecenderungan mahasiswa memberikan skor tinggi pada opsi baik. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai dualisme

pemerintahan desa pakraman dan desa dinas sudah berjalan dengan baik sampai saat ini dan sebagian kecil dari total responden memberikan skor pada opsi kurang baik dan tidak baik. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa desa yang menjalankan dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas kurang baik dan tidak baik sampai saat ini.

Tabel 41
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Penilaian Mahasiswa Terhadap Tata Cara Sosialisasi Undang-Undang Tentang Desa Tersebut

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
4	31	43	20	94	31	86	60	177	1,88

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 41 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang penilaian mahasiswa terhadap tata cara sosialisasi Undang-undang tentang desa tersebut. Sebanyak 31 responden menjawab tidak berjalan dengan baik dengan skor 31, sebanyak 43 responden menjawab kurang berjalan dengan baik dengan skor 86, dan sebanyak 20 responden menjawab berjalan dengan baik dengan skor 60. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,88. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 4 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penilaian mahasiswa terhadap tata cara sosialisasi Undang-undang tentang desa tersebut. Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa cenderung memberikan skor tinggi pada opsi kurang berjalan dengan

baik. ini menunjukkan kurangnya kesadaran pemerintah untuk lebih gencar melaksanakan sosialisasi mengenai undang-undang tentang desa tersebut dan jika mengadakan sosialisasi tentang undang-undang desa tersebut hendaknya dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian dari kalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Beberapa responden juga memberi penilaian yang cenderung tinggi pada opsi tidak berjalan dengan baik. ini juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengetahuan masyarakat, khususnya mahasiswa mengenai Undang – undang yang mengatur tentang desa tersebut. Dari hasil observasi, dapat dilihat bahwa selama ini sosialisasi tentang undang – undang desa tersebut, memang kurang berjalan dengan baik. Seharusnya, pemerintah harus lebih serius untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-undang tersebut, bila perlu dikemas semenarik mungkin untuk dapat menarik minat masyarakat khususnya mahasiswa untuk ikut didalamnya.

Tabel 42
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Puas Tidaknya Mahasiswa Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang Akan Melindungi Hak-Hak Desa dan Keberadaannya

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
5	38	40	16	94	114	80	16	210	2,23

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 42 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang puas tidaknya mahasiswa dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang akan melindungi hak-hak desa dan keberadaannya. Sebanyak 38 responden menjawab puas dengan skor 114, sebanyak 40 responden

menjawab kurang puas dengan skor 80, dan sebanyak 16 responden menjawab tidak puas dengan skor 16. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,23. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 5 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang puas tidaknya mahasiswa dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang akan melindungi hak-hak desa dan keberadaannya. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat gambaran yang jelas bahwa mahasiswa sangat puas dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang akan melindungi hak-hak desa dan keberadaannya. Ini menunjukkan besar harapan mahasiswa jika nantinya undang-undang ini dipertegas penerapannya di Bali. Karena selain untuk melindungi hak-hak desa dan keberadaannya, undang-undang ini juga akan mengefesiensikan fungsi dan tugas desa dengan menghilangkan salah satu nama untuk menggabungkan fungsi dan tugas dari kedua desa tersebut. Selain itu, beberapa mahasiswa cenderung memilih kurang puas dengan adanya undang-undang tersebut. Ini dikarenakan keraguan mahasiswa tentang keberadaan undang-undang tersebut apakah benar-benar dapat melindungi hak dan keberadaan desa atau hanya sekedar wacana.

Tabel 43
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Penilaian Mahasiswa
Jika Pemerintah Menentukan Sikap dan Memilih Desa Dinas Untuk
Dipertahankan

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		1	2	3		
6	29	42	23	94	29	84	69	182	1,94

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 43 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang penilaian mahasiswa jika pemerintah menentukan sikap dan memilih desa dinas untuk dipertahankan. Sebanyak 29 responden menjawab tidak setuju dengan skor 29, sebanyak 42 responden menjawab kurang setuju dengan skor 84, dan sebanyak 23 responden menjawab setuju dengan skor 69. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 1,94. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 6 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penilaian mahasiswa jika pemerintah menentukan sikap dan memilih desa dinas untuk dipertahankan. Dari hasil olah data diatas mahasiswa cenderung memberikan skor tinggi pada opsi kurang setuju jika pemerintah menentukan sikap untuk memilih desa dinas dipertahankan. Ini menunjukkan mahasiswa ingin mempertahankan eksistensi desa pakraman tanpa menghilangkan desa dinas.

Tabel 44
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Penilaian Mahasiswa
Jika Pemerintah Menentukan Sikap Dan Memilih Desa Pakraman Untuk
Dipertahankan

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata- rata
	A	B	C		3	2	1		
7	30	39	25	94	90	78	25	193	2,05

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 44 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang penilaian mahasiswa jika pemerintah menentukan sikap dan

memilih desa pakraman untuk dipertahankan. Sebanyak 30 responden menjawab setuju dengan skor 90, sebanyak 39 responden menjawab kurang setuju dengan skor 78, dan sebanyak 25 responden menjawab tidak setuju dengan skor 25. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,05. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 7 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penilaian mahasiswa jika pemerintah menentukan sikap dan memilih desa pakraman untuk dipertahankan. Dari hasil olah data diatas dapat dipertegas bahwa mahasiswa ingin mempertahankan keberadaan desa pakraman. Ini terlihat dari kecenderungan mahasiswa memberikan skor tinggi pada pilihan setuju. Disamping itu mahasiswa Universitas Warmadewa juga ingin melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal di Bali dengan tetap menjaga keberadaan desa pakraman itu sendiri.

Tabel 45
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Jika Proses Ini atau Untuk Menentukan Sikap Memilih Diserahkan Kepada Unsur Pemerintah Daerah Masing-Masing dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal Setempat

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
8	22	38	34	94	22	76	102	200	2,13

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 45 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang bagaimana jika proses ini atau untuk menentukan sikap memilih diserahkan kepada unsur pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kearifan lokal setempat. Sebanyak 22 responden menjawab

tidak setuju dengan skor 22, sebanyak 38 responden menjawab kurang setuju dengan skor 76, dan sebanyak 34 responden menjawab setuju dengan skor 105. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,28. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 8 termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam interval 1,67-2,33. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana jika proses ini atau untuk menentukan sikap memilih diserahkan kepada unsur pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kearifan lokal setempat. Dari hasil olah data diatas bahwa mahasiswa cenderung memberikan skor tinggi pada opsi setuju karena mahasiswa menilai pemerintah dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi warganya, khususnya di dalam hal untuk menentukan sikap memilih diantara keberadaan dua desa tersebut. Disamping itu, beberapa mahasiswa juga memberikan skor yang lumayan tinggi pada opsi kurang setuju. Ini menunjukkan keragu-raguan mahasiswa terhadap pemerintahan daerah tersebut jika proses ini atau untuk menentukan sikap memilih diantara dua desa tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

Tabel 46
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Bagaimana Jika Proses Ini atau Untuk Menentukan Sikap Memilih Diserahkan Kepada Unsur Desa Yang Bersangkutan atau Masyarakat

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		3	2	1		
9	61	23	10	94	183	46	10	239	2,54

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 46 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang bagaimana jika proses ini atau untuk menentukan sikap memilih diserahkan kepada unsur desa yang bersangkutan atau masyarakat. Sebanyak 61 responden memilih setuju dengan skor 183, sebanyak 23 responden menjawab kurang setuju dengan skor 46, dan sebanyak 10 responden menjawab tidak setuju dengan skor 10. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,54. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 9 termasuk dalam kategori tinggi karena berada dalam interval 2,34 - 3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana jika proses ini atau untuk menentukan sikap memilih diserahkan kepada unsur desa yang bersangkutan atau masyarakat. Dari hasil olah data diatas dapat dilihat bahwa mahasiswa memiliki pengertian yang tinggi tentang masalah tersebut. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang berda dalam kategori tinggi. Dilihat dari kecenderungan mahasiswa memberikan nilai tinggi pada opsi setuju, ini menunjukkan bahwa mahasiswa benar-benar ingin mengetahui apa dan bagaimana yang sebenarnya diinginkan oleh desa atau masyarakat desa yang bersangkutan. Hal itu pula yang memberikan kebebasan kepada setiap desa untuk menentukan sikap desa mana yang akan dipertahankan yang sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal setempat. Dari hasil observasi dapat dilihat mahasiswa atau responden memberikan pandangan yang positif jika proses atau untuk menentukan sikap memilih diserahkan kepada unsur desa yang bersangkutan atau masyarakat. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan

adanya keterlibatan masyarakat dalam hal apapun, apalagi menyangkut permasalahan tentang desa, baik dinas maupun pakraman.

Tabel 47
Frekuensi dan Skor Jawaban Dari 94 Responden Tentang Setuju Tidaknya Mahasiswa Jika Dualisme Desa di Bali Tetap Berjalan Sebagaimana Mestinya Tanpa Diubah dan Diatur Kembali

No	Frekuensi Jawaban			Total Resp	Skor Jawaban			Total Skor	Rata-rata
	A	B	C		1	2	3		
10	17	25	52	94	17	50	156	223	2,37

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari tabel 47 diatas menunjukkan frekuensi dan skor jawaban dari 94 responden tentang setuju tidaknya mahasiswa jika dualisme desa di Bali tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa diubah dan diatur kembali. Sebanyak 17 responden menjawab tidak setuju dengan skor 17, sebanyak 25 responden menjawab kurang setuju dengan skor 50, dan sebanyak 52 responden menjawab setuju dengan skor 156. Dari perhitungan skor diatas di dapatkan rata-rata skor 2,37. Maka jawaban responden untuk pertanyaan no 10 termasuk dalam kategori tinggi karena berada dalam interval 2,34-3,00. Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang setuju tidaknya mahasiswa jika dualisme desa di Bali tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa diubah dan diatur kembali. Dari hasil olah data diatas terlihat dengan jelas pengetahuan dan perhatian mahasiswa tinggi terhadap masalah tersebut. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang diperoleh berada pada kisaran kategori tinggi. Selanjutnya dilihat dari skor jawaban yang diberikan sebagian besar mahasiswa memberikan skor tinggi pada jawaban setuju. Ini menunjukkan

bahwa mahasiswa tetap ingin menjaga dan melestarikan dualisme desa di Bali yang telah berjalan dari masa penjajahan Belanda dan sudah terbukti eksistensinya tanpa ada konflik yang begitu berarti diantara dua desa tersebut. Seiring berjalannya waktu, dari dulu hingga sekarang antara desa pakraman dan desa dinas tetap bisa menjalankan tugas dan wewenang tanpa saling berebut satu antara yang lain. Ini menunjukkan bahwa kedua desa tersebut konsisten menjaga keharmonisan hubungan antara desa pakraman dan desa dinas guna berjalannya pemerintahan yang efisien. Sebagian kecil dari responden memberikan skor pada opsi kurang setuju. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa juga menginginkan adanya kejelasan undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dua desa tersebut selain sudah diatur dalam beberapa perda dan undang –undang terdahulu.

C. Interpretasi

Dalam karya tulis ini, peneliti menambahkan interpretasi untuk memperjelas isi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebelum menjelaskan tentang hasil dan isi, peneliti akan menjabarkan tentang interpretasi. Interpretasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Jika suatu objek (karya seni, ujaran, dll) cukup jelas maknanya, objek tersebut tidak akan mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang

berlangsung atau hasilnya. Tujuan interpretasi biasanya adalah untuk meningkatkan pengertian.

C.1. Persepsi

Tabel 48
Kategori Variabel Persepsi Mahasiswa Universitas Warmadewa Terhadap Adanya Dualisme Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

No	Kategori	Frekuensi Skor	Total Frekuensi Jawaban	Persentase	Jumlah Responden
1	Tinggi	3	354	37,66%	35
2	Sedang	2	368	39,15%	37
3	rendah	1	218	23,19%	22
Jumlah			940	100%	94

Sumber : Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Dilihat dari hasil olah data diatas, terlihat bahwa persentase jawaban responden untuk aspek persepsi adalah 37,66% (35 responden) termasuk dalam kategori tinggi, 39,15% (37 responden) termasuk dalam kategori sedang, dan 23,19% (22 responden) termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil analisis data responden tentang persepsi, selanjutnya akan diinterpretasikan untuk memberi gambaran yang jelas terkait persepsi mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas di Bali setelah berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014.

Dari hasil analisis, diperoleh gambaran bahwa terdapat pilihan persepsi yang sangat bervariasi diantara responden. Ini ditunjukkan dari jawaban yang dipilih responden cenderung berbeda. Ini membuktikan bahwa pengetahuan dasar mahasiswa tentang permasalahan diatas bervariasi antara satu dengan yang lain.

Dilihat dari tabel diatas bahwa kecenderungan jawaban mahasiswa atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti termasuk dalam kategori sedang. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Warmadewa berpengetahuan sedang tentang permasalahan diatas.

Dari data di atas terlihat jelas dalam hal pembentukan undang-undang no 6 tahun 2014 di sini mahasiswa cenderung menjawab setuju. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan undang-undang tersebut dapat melindungi keberadaan desa itu sendiri. Mahasiswa Universitas warmadewa juga mendukung jika Undang-undang tersebut di berlakukan di Bali. Jika disinggung tentang dualisme desa mahasiswa berpandangan bahwa dualisme desa di Bali masih sesuai dijalankan. Dari berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dengan adanya dualisme di bali mahasiswa berpandangan setuju, dalam arti ini mahasiswa mendukung Undang-undang tersebut dengan syarat tanpa menghilangkan tradisi dan asal muasal bali, salah satunya adalah adanya dua desa yang berlainan fungsi dan tugas tetapi berada dalam satu atap. Tetapi jika dianjurkan memilih mahasiswa cenderung kurang setuju, ini di karenakan mahasiswa memiliki kepekaan tinggi dalam menjawab atau berpandangan tentang suatu permasalahan. Dari sudut pandang yang berbeda memungkinkan mahasiswa ingin menjaga eksistensi keberadaan dualisme desa yang telah berjalan dari masa penjajahan belanda.

Dari sekian penjabaran dapat di lihat dengan jelas bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa memberikan pandangan dan tanggapan yang negatif terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah

berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Mahasiswa mendukung di bentuknya dan penerapan Undang-undang No 6 tahun 2014 di bali. Ini ditunjukkan dari hasil olah data diatas bahwa 37 responden (39,15%) termasuk dalam kategori sedang.

C.2 Sikap

C.2.1. Aspek Kongnitif

Dari hasil perhitungan rata-rata skor jawaban responden untuk 10 pertanyaan sikap dari aspek kongnitif adalah 1,97. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa rata-rata skor jawaban responden untuk aspek kongnitif termasuk dalam kategori sedang karena berada pada interval 1,67-2,33.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengetahuan dasar mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014. Dari analisis jawaban responden tersebut, terlihat jelas adanya perbedaan pemahaman dan pengetahuan dasar mahasiswa antara satu dengan yang lainnya sehingga berpengaruh signifikan terhadap rata-rata skor. Perbedaan pemahaman dan pengetahuan tersebut memberi gambaran bahwa tidak semua responden mengikuti perkembangan Undang-undang No 6 tahun 2014 dan terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas.

Tingkat pengetahuan dasar mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 sangat bervariasi, ini di tunjukan oleh perbedaan

pilihan jawaban mahasiswa terhadap kuisioner yang di edarkan. Tingkat pengetahuan mahasiswa yang bervariasi terlihat jelas dari perbedaan rata-rata skor jawaban yang diberikan mahasiswa terkait dengan beberapa persoalan yang di tanyakan menyangkut pokok-pokok ulasan yang di atur dalam undang-undang desa tersebut, perkembangan dan perjalanan Undang-undang desa, dan adanya dualisme desa pakraman dan desa dinas di Bali.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Warmadewa terkait dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 dalam kategori sedang. Hal ini setidaknya memberi gambaran bahwa tidak semua mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar mengetahui tentang adanya dualisme desa dan keberadaan Undang-undang no 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa.

C.2.2. Aspek Afektif.

Dari hasil perhitungan rata-rata skor jawaban responden untuk 10 pertanyaan sikap dari aspek afektif adalah 2.04. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa rata-rata skor jawaban responden untuk aspek afektif termasuk dalam kategori sedang karena berada pada interval 1,67-2,33.

Selanjutnya dari hasil analisis data tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat perasaan mahasiswa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014. Dari 10 jawaban responden tersebut, dapat di peroleh gambaran bahwa mahasiswa Universitas Warmadewa

Denpasar kurang begitu senang ini terlihat dari rata-rata skor yang berada pada kategori sedang. Pada aspek ini mahasiswa terlihat tidak senang jika Undang-undang no 6 tahun 2014 ini tetap di paksakan penerapannya di bali tanpa mempertimbangkan kearifan lokal setempat yang senantiasa berbeda. Ini dapat dilihat dari kecenderungan mahasiswa (54 responden) menjawab tidak senang dengan permasalahan tersebut.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perasaan mahasiswa terkait dengan adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 Dari perbedaan hasil rata-rata skor yang menunjukkan kategori sedang memberikan gambaran jelas bahwa tidak semua mahasiswa merasa senang dengan dengan adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 dan ada beberapa pula yang senang jika ini memang dengan tegas diterapkan di Bali.

C.2.3 Aspek Evaluasi

Dari hasil perhitungan rata-rata skor jawaban responden untuk 10 pertanyaan sikap dari aspek evaluasi adalah 2,17. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa rata-rata skor jawaban responden untuk aspek evaluasi termasuk dalam kategori sedang karena berada pada interval 1,67-2,33.

Dari hasil analisis data tersebut diatas akan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pilihan sikap mahasiswa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya undang-undang no 6 tahun 2014 dari aspek evaluasi. Dari hasil analisis, diperoleh

gambaran bahwa terdapat pilihan sikap yang sangat bervariasi di antara responden. Yang paling signifikan terlihat dari pilihan mahasiswa pada pertanyaan no 9 yang mana jika proses untuk memilih di serahkan kepada unsur desa yang bersangkutan atau masyarakat kecenderungan mahasiswa mendukung dan memilih setuju, ini diperkuat dengan rata-rata skor yang di berikan mahasiswa pada pertanyaan ini yang berada pada kategori tinggi. Ini juga terjadi pada soal no 10 yang di mana jika dualisme di bali tetap berjalan seperti bagai mana mestinya tanpa harus diubah dan diatur kembali kecenderungan mahasiswa mendukung dan menyatakan setuju dengan hal diatas. Hal ini juga didi perkuat dengan pemeberian rata rata skor pada pertanyaan ini yang berada pada kisaran kategori tinggi.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa penilaian mahasiswa terkait dengan adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 Dari perbedaan hasil rata-rata skor yang menunjukkan kategori sedang memberikan gambaran jelas bahwa tidak semua mahasiswa menyatakan tidak setuju dengan dengan adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014dan ada beberapa pula yang setuju jika ini memang dengan tegas diterapkan di Bali.

C.2.4 Sikap (Kognitif, Afektif, evaluasi) mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di Bali.

Selanjutnya, untuk memperoleh rata-rata skor sikap mahasiswa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya

Undang-undang no 6 tahun 2014 di Bali maka dilakukan penjumlahan total skor rata rata dari masing-masing aspek (kognitif,afektif dan evaluasi) selanjutnya di bagi 3 seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 49
Rata-Rata Skor Sikap Mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar
Terhadap Dualisme Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas di Bali Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Persentase	Kategori
1	Kognitif	1,99	31,94%	Sedang
2	Afektif	2,07	33,23%	Sedang
3	Evaluasi	2,17	34,83%	Sedang
Jumlah		6,23	100%	SEDANG
Rata-Rata Skor		2,07		

Sumber: Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

Berdasarkan tabel diatas, dapat di jelaskan rata-rata skor dan persentase sikap mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 di Bali. Dari hasil rekapitulasi terhadap jawaban responden atas pertanyaan yang berkaitan dengan aspek kognitif,afektif dan evaluasi, telah diperoleh rata-rata skor sebesar 2,07 dengan rincian aspek kognitif 1,99 (31,94%) termasuk dalam kategori sedang, aspek afektif 2,07 (33,23%) termasuk dalam kategori sedang dan aspek evaluasi 2,17 (34,83%) termasuk dalam kategori sedang. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari aspek kognitif atau pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap permasalahan

diatas cenderung kurang memahami. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang diberikan oleh responden berada dalam kategori sedang. Dilihat dari aspek afektif, perasaan senang dan tidak senang dapat dilihat dengan jelas bahwa mahasiswa merasakan kurang senang terhadap permasalahan tersebut. Ini ditunjukkan dari skor yang diberikan pada aspek afektif berada pada kategori sedang. Dilihat dari aspek evaluasi atau penilaian, mahasiswa cenderung menilai kurang setuju terhadap permasalahan diatas. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang diberikan oleh responden berada dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 di bali kurang mendukung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai langkah terakhir dalam mengadakan suatu penelitian adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka berikut akan diuraikan kesimpulan antara lain:

1. Aspek Persepsi Mahasiswa Terhadap Adanya Dualisme Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas di Bali Dengan Berlakunya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 - Berdasarkan hasil analisis data pada variabel persepsi mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas diBali setelah berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah sedang. Hal ini terlihat dari hasil jawaban responden yang 35 responden (37,66%) untuk kategori tinggi, 37 responden (39,15%) untuk kategori sedang, dan 22 responden (23,19%) untuk kategori rendah.
 - Dari analisis yang telah dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas warmadewa terhadap dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas diBali setelah berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014 kurang paham atau negatif. Ini terlihat dari 37 responden (39,15%) menjawab sedang.

2. Aspek Sikap Mahasiswa Terhadap Adanya Dualisme Pemerintahan Desa Pakraman dan Desa Dinas di Bali Dengan Berlakunya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Berdasarkan hasil interpretasi data variabel sikap aspek kognitif atau pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap permasalahan diatas cenderung kurang memahami. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang diberikan oleh responden berada dalam kategori sedang.
- Berdasarkan hasil interpretasi data variabel sikap aspek afektif, perasaan senang dan tidak senang dapat dilihat dengan jelas bahwa mahasiswa merasakan kurang senang terhadap permasalahan tersebut. Ini ditunjukkan dari skor yang diberikan pada aspek afektif berada pada kategori sedang.
- Berdasarkan hasil interpretasi data variabel sikap aspek evaluasi atau penilaian, mahasiswa cenderung menilai kurang setuju terhadap permasalahan diatas. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor yang diberikan oleh responden berada dalam kategori sedang.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap mahasiswa Universitas Warmadewa Denpasar terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas setelah

berlakunya Undang-undang no 6 tahun 2014 di bali kurang mendukung.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan disampaikan saran-saran yang semoga dapat berguna dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas serta diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa agar dapat memberikan pandangan, tanggapan (persepsi) dan memberikan penilaian (sikap) terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Berikut akan diuraikan beberapa saran antara lain:

1. Berkaitan dengan aspek persepsi (pengertian dan pemahaman) mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap adanya dualisme pemerintahan desa pakraman dan desa dinas di Bali dengan berlakunya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan cara meningkatkan daya kepekaan mahasiswa terhadap suatu permasalahan sosial yang muncul di masyarakat dan memperketat proses belajar mengajar, agar dapat meningkatkan pengetahuan dasar mahasiswa Universitas Warmadewa yang mampu melahirkan pemikir-pemikir muda yang berkualitas dan memiliki daya saing dalam lingkungannya masing-masing.
2. Berkaitan dengan aspek sikap (kognitif, afektif, dan evaluasi) mahasiswa Universitas Warmadewa Mahasiswa terhadap adanya dualisme

pemerintahan desa pakraman dan desa dinas di Bali dengan berlakunya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan cara ikut berpartisipasi serta berperan aktif dalam setiap organisasi kemahasiswaan baik intern kampus, maupun diluar kampus untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Warmadewa terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suyakto. 1988. *Persepsi Sosial (Psikologi Sosial dan Ruang Lingkupnya)*. Jakarta: Karunia.
- Budiarjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko. 2013. *Membangun Good Goverment di Desa*. Yogyakarta: IRE Pers
- James A. Black dan Dean J. Champion. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*.
- Maligo. 1983. *Kamus Psikologi*. Bandung: Tonis
- Paramitha, Gde. 2013. *Silang pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Udayana Pers.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Putra Astiti, Tjok Istri. 2013. *Desa Adat menggugat dan Digugat*. Udayana University Pers.
- Rahmat, Jalaludin. 1986. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: CV. Remaja Karya
- Suacana, I Wayan Gede. 2007. *Tranformasi Tata Pemerintahan Desa Era Transisi: Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Perspektif Kajian Budaya*. Desertasi 2007
- Suacana, I Wayan Gede. 2013. *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Surachman, Winarno. 1999. *Dasar-dasar dan Teknik Research*. Bandung: PT Tarsito
- Sutrisno, Hadi. 1996. *Metodologi Research*. Yayasan fakultas Psikologi
- Winardi. 1976. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni
- Wardalis. 1998. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Muji Aksara
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Adat UNUD 2001

Undang-undang nomor 12 Tahun 1992

Undang-undang nomor 32 tahun 2004

Undang-undang nomor 6 tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Pertanyaan (kuisisioner)
Lampiran 2	: Struktur Tata Kelola dan Organisasi Universitas Warmadewa Denpasar
Lampiran 3	: Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 4	: Ijin Penelitian dari LP2M Universitas Warmadewa
Lampiran 5	: SK Pembimbing skripsi
Lampiran 6	: Daftar Keadaan Dosen, Mahasiswa, dan Alumni Universitas Warmadewa tahun 2014-2015
Lampiran 7	: Daftar nama informan atau responden